

**CIREBON DI BAWAH KEKUASAAN MATARAM TAHUN 1613 – 1705 : KAJIAN  
HISTORIS MENGENAI HUBUNGAN POLITIK, SOSIAL DAN AGAMA**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)



**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH  
JAKARTA**

**1438 H / 2017 M**

## Lembar Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan Skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 22 Maret 2017

Moh Rahmat Hidayat

Universitas Islam Negeri  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

**CIREBON DI BAWAH KEKUASAAN MATARAM TAHUN 1613 – 1705 :  
KAJIAN HISTORIS MENGENAI HUBUNGAN POLITIK, SOSIAL DAN  
AGAMA**

**Skripsi**

Dilaksanakan sebagai Salah Satu Tugas Akademik untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)


Oleh:

**Moh Rahmat Hidayat**  
**Nim: 1110022000020**

Disetujui oleh  
Pembimbing,



**Dr. Saidun Derani, M.A**  
**NIP: 19570227 19920 1 001**



**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH**  
**JAKARTA**  
**1438 H/2017 M**



## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **Cirebon Di Bawah Kekuasaan Mataram Tahun 1613 – 1705 : Kajian Historis Mengenai Hubungan Politik, Sosial Dan Agama**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tanggal 22 Maret 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum) pada Program Studi Sejarah Dan Kebudayaan Islam.

Ciputat, 22 Maret 2017

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota,



Nurhasan, MA

NIP: 19690724 199703 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Sholikatus Sa'diyah, M. Pd.

NIP: 19750417 200501 2 007

Anggota,

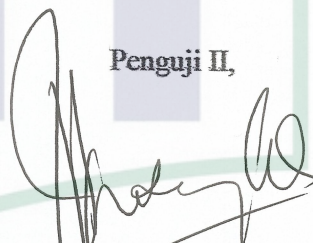
Penguji I,



Prof. Dr. Budi Sulationo, M.Hum

NIP: 19541010 198803 1 001

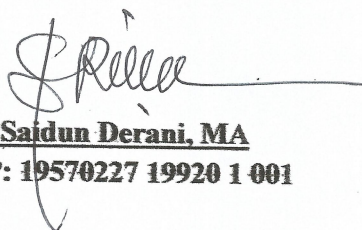
Penguji II,



Drs. Tarmizy Idris, MA

NIP: 19601212 199003 1 003

Pembimbing,



Dr. Saidun Derani, MA

NIP: 19570227 19920 1 001

## Dedikasi

*“ Teruntuk Bapak Drs. H. Ahmad Sholeh, M.Pd.I dan Ibu Dra. Hj. Syamkhiyah, Maulana Syafaat dan semua orang yang terlibat dalam pembuatan Skripsi ini”*

*“Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH.”*

Universitas Islam Negeri  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan skripsi ini, begitu banyak penulis menemui rintangan dan hambatan. Sungguh pun begitu Alhamdulillah atas kerja keras semangat dan dukungan dari semua pihak akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu izinkan penulis untuk menghaturkan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Sudah seharusnya penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Sukron Kamil, MA selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Muhammad Farkhan, M.Pd Selaku Wadep Fakultas Adab dan Humaniora Bidang Akademik, yang telah memudahkan penulis dalam mengurus persyaratan hingga ujian Munaqasyah.
3. Prof. Dr. Budi Sulistiono, M. Hum dan Drs. Tarmizy Idris, MA selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan demi layaknya skripsi penulis.
4. Nurhasan, MA selaku Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam dan Shalikus Sa'diyah, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam proses terlaksananya ujian Munaqasyah.
5. Dr. Saidun Derani, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian studi, Beliau tak henti - hentinya selalu menyemangati dan mendorong supaya menjadi orang yang sukses serta penuh dedikasi tinggi dalam proses bimbingannya.
6. Seluruh dosen Fakultas Adab dan Humaniora, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis.
7. Kedua orangtua tercinta, Drs. H. Ahmad Sholeh, M.Pd.I dan Dra. Hj. Syamkhiyah. Terima kasih yang tulus, rasa ta'dzim dan hormat penulis haturkan atas kesabaran, nasihat, dan kasih sayang yang tiada pernah berujung. Ini wujud 'bangga' untuk ayahanda dan ibunda dari penulis,



semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat.  
Amien.

8. Mas Reyhan Biadillah, S.Hum yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Adikku tercinta Maulana Syafaat yang sedang menempuh jenjang pendidikan juga semoga apa yang dipelajari kelak dapat bermanfaat bagi keluarga dan bangsa.
10. PERMAI – AYU DKI Jakarta yang sudah menampung penulis selama menjalankan studi sampai penulisan selesai. Indrawan-Indrawati dan Keluarga Besar Persatuan Mahasiswa Indramayu (Permai Ayu DKI Jakarta) yang senantiasa berjuang untuk Indramayu tercinta “ *Dari Hati Dalam Jiwa* ”
11. Seluruh Mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam angkatan 2010, khususnya Agung Basit, S.Hum dan Johan Eko Prasetyo, S.Hum yang selalu memberi *support* kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
12. KMSGD (Keluarga Mahasiswa Sunan Gunung Djati) DKI Jakarta yang sudah menampung penulis selama menjalankan studi sampai penulisan selesai. Sugawan/wati dan Pengurus Keluarga Mahasiswa Sunan Gunung Djati yang sudah memberi ilmu tentang cara berorganisasi yang baik dan benar.

Penyusunan skripsi ini, Penulis memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga tulisan ini bisa memberikan manfaat kepada siapa saja yang menjadikan ini sebagai bahan bacaan mereka dan dapat menjadikan tulisan ini sebagai referensi.

Jakarta, 22 Maret 2017

Penulis

**Moh. Rahmat Hidayat**

## ABSTRAK

**Moh. Rahmat Hidayat**

**1110022000020**

Studi ini mengkaji “**Cirebon di bawah kekuasaan Mataram tahun 1613 – 1705 : Kajian historis mengenai hubungan politik, sosial dan agama**”, dua kerajaan bercorak Islam itu bersahabat sejak tahun 1590 (akhir abad 16). Persoalannya muncul ketika Mataram mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1613-1677, di mana hubungan dengan Cirebon bersifat protektorat. Pada waktu pengaruh VOC masuk Mataram pola relasi Cirebon - Mataram mengalami perubahan dari protektorat Cirebon menjadi kerajaan bebas. Studi ini ingin menjelaskan dinamika relasi Cirebon Mataram di atas melalui sumber tertulis.

Untuk menjelaskan masalah di atas penulis menggunakan metode historis, melalui sumber tertulis dengan pendekatan politik. Politik yang dimaksud untuk melihat struktur kekuasaan dalam sebuah peristiwa. Pendekatan tersebut berguna untuk menentukan teori yang tepat digunakan bagi penelitian ini.

Temuan studi ini adalah terjadinya pasang surut hubungan Cirebon Mataram sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik, keluarga dan agama.

**Kata Kunci:** Cirebon, Mataram, Politik, Sosial dan Agama, VOC.

Universitas Islam Negeri  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt, atas nikmat, hidayah, dan rahmat yang dilimpahkan kepada hamba-Nya yang fana ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan kita para pengikutnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **CIREBON DI BAWAH KEKUASAAN MATARAM TAHUN 1613 – 1705 : KAJIAN HISTORIS MENGENAI HUBUNGAN POLITIK, SOSIAL DAN AGAMA.**

Berkat kekuatan yang diberikan oleh Allah Swt yang Maha Rahman dan Rahim, skripsi ini bisa di selesaikan dalam kontek mendapatkan gelar Program Sarjana (S1) di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulis

Moh Rahmat Hidayat

Universitas Islam Negeri  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>DEDIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	7
1. Pokok Masalah.....	8
2. Batasan Masalah.....	11
3. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Dan Manfaat Studi .....	12
D. Landasan Teori.....	13
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM CIREBON</b> .....	<b>23</b>
A. Kondisi Geografis .....	23
B. Kondisi politik.....	26
C. Kondisi Ekonomi .....	28

D. Kondisi Agama .....	30
<b>BAB III BENTUK JALINAN HUBUNGAN ANTARA CIREBON DAN MATARAM.....</b>	<b>33</b>
A. Politik Perkawinan .....	33
1. Hubungan Kekerabatan.....	34
2. Tradisi Magang Tahun 1625 - 1677.....	37
B. Kebijakan Mataram Terhadap Cirebon.....	39
1. Penerapan Struktur .....	39
2. Asosiasi Simbol.....	41
a. Bidang Religius.....	42
b. Bidang Kesenian dan Pendidikan.....	45
<b>BAB IV PASANG SURUT HUBUNGAN CIREBON DAN MATARAM.....</b>	<b>48</b>
A. Cirebon Sebagai Mediator.....	48
1. Penyeimbangan Relasi Politik.....	48
a. Mediasi dengan VOC.....	48
b. Mediasi dengan Banten .....	51
B. Surutnya Hubungan Cirebon dan Mataram .....	54
1. Perebutan Tahta di Istana .....	54
2. Gangguan Banten.....	57
3. Sikap Pasif Cirebon terhadap Konflik di Mataram .....	59
C. Lepasnya Cirebon dari Pengaruh Mataram.....	61
1. Dilepasnya Cirebon dari Protektorat Mataram .....	62
2. Cirebon di Bawah Protektorat VOC .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setelah runtuhnya Kesultanan Demak pada dekade pertengahan abad ke-16 secara tidak langsung menimbulkan dampak politik yang cukup besar terhadap pola pemerintahan Islam di Jawa, kesepakatan politik di pulau Jawa terbagi dalam beberapa kesultanan merdeka, seperti Pajang, Cirebon, Banten, Giri, koalisi Surabaya, dan kerajaan Hindu terakhir di Blambangan.<sup>1</sup>

Cirebon adalah sebuah kesultanan merdeka setelah runtuhnya kesultanan Demak pada tahun 1546. Cirebon sendiri telah mantab berada di bagian daerah Pasundan. Sejatinya Cirebon enggan berada di bawah kekuasaan Pajang, sebab Pajang menganut paham Syiah, sedangkan Cirebon berpaham Sunni.<sup>2</sup> Sepanjang pertengahan abad ke-16, tidak satupun kesultanan-kesultanan itu berperang dan memperebutkan wilayah satu dengan yang lainnya. Masing-masing mengkonsolidasikan kesultanan mereka sendiri. Hingga akhir abad ke-16 munculnya kekuatan Mataram di pedalaman Jawa pada tahun 1585, menjadi ancaman serius terhadap kemerdekaan politis kesultanan-kesultanan yang ada di pulau Jawa. Di

---

<sup>1</sup>H.J de Graaf dan TH Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa, Tinjauan Sejarah Politik Abad XV-XVI*, terj. -, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm. 126.

<sup>2</sup> Slamet Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Munculnya Kerajaan-kerajaan Islam*, (Yogyakarta: LkiS, 2006), hlm. 76.



kemudian hari satu persatu kesultanan-kesultanan itu, berada di bawah kekuasaan Mataram.

Kekalahan Pajang dari Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati (Raden Sutawijaya) pada tahun 1580, menjadi awal kebangkitan Mataram dalam hegemoni politik di pulau Jawa,<sup>3</sup> ditambah pula ancaman dari VOC yang berusaha menguasai perdagangan di pulau Jawa dan Nusantara sejak tahun 1602.

Setelah jatuhnya Pajang membuat Mataram seakan-akan menjadi satu pihak yang mendominasi pulau Jawa selama abad ke-17 dan 18. Memang selama masa pemerintahan Panembahan Senopati, kesultanan Mataram belumlah sampai mendominasi politik di pulau Jawa. Kejayaan Mataram baru terjadi saat Raden Mas Rangsang didapuk di atas tahta Mataram pada tahun 1613, dia mencoba untuk menyatukan pulau Jawa di bawah satu kekuasaan Mataram. Sebagai Sunan Mataram yang bergelar Anyakrakusuma, dia telah menerapkan penyatuan daerah kekuasaan dengan mendudukkan semua kekuatan di bawah perintahnya. Berturut-turut dia mulai menaklukkan wilayah-wilayah yang berpengaruh di pulau Jawa, baik melalui tindakan keras seperti penaklukan militer maupun dengan cara yang halus, yaitu dengan ikatan perkawinan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>H.J. de Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, terj. Pustaka Utama Grafiti dan KITLV, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 56.

<sup>4</sup>G. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994). 43.

Sistem birokrasi Mataram terbagi dalam enam bagian, yaitu *Kutaraja, Nagragung, Monconagoro, Bang, Pasisir* dan *Sabrang*. Sistem itu kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan langsung dengan Bupati dan sistem *vassal* atau negara protektorat, seperti Cirebon. Oleh karena itu, Cirebon bukanlah daerah bawahan langsung Mataram, melainkan daerah *vassal* atau protektorat, sekalipun Cirebon telah menerapkan kebijakan-kebijakan dari Mataram. Cirebon juga tidak berkewajiban menyerahkan upeti dalam upacara *seba* setiap tahunnya, sebagai tanda kepatuhan kepada raja Mataram.<sup>5</sup>

Cara penaklukan wilayah dengan cara keras dilakukan oleh Sultan Agung, terutama untuk wilayah yang secara politik tidak mau tunduk pada Mataram seperti Surabaya, Lasem, Pati, dan Giri. Sedangkan penaklukan secara halus dilakukan Mataram terutama untuk kesultanan Cirebon, Sultan Agung menganggap bahwa Sultan Cirebon adalah guru sekaligus mertuanya.<sup>6</sup> Politik perkawinan juga dilakukan setelah penaklukan secara militer, hal itu terlihat setelah penaklukan Surabaya pada tahun 1624.

Relasi antara Cirebon dan Mataram sejatinya sudah berlangsung pada tahun 1595, namun relasi yang lebih intens terjadi sepanjang tahun 1613-1705. Relasi tersebut terjadi pasang surut, karena kepentingan politis

---

<sup>5</sup> Pada beberapa sumber mengatakan, Cirebon memberikan penyerahan sebagai upeti. Namun pendapat yang paling kuat, menyatakan bahwa Cirebon tidak pernah memberikan upeti selama masa Sultan Agung hingga akhir masa Susuhunan Amangkurat I. Apabila ada pernyataan tentang penyerahan, maka hal itu hanya bersifat pemberian sukarela berupa hadiah sebagai bentuk penghormatan, bukan dalam bentuk penyerahan upeti.

<sup>6</sup> Hasan Muarif Ambary, *Tinjauan Akeologis dan Historis Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2012), hlm. 118.

antara kedua belah pihak, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Cirebon selama masa itu menjadi mediator bagi pihak-pihak yang bertikai, seperti saat konflik antara Mataram-VOC dan antara Mataram-Banten. Selama masa tersebut Cirebon memainkan peranan penting dalam perpolitikan di Jawa dan mempertahankan relasi damainya terhadap Mataram yang menjadi negara protektoratnya, sebelum mengalihkan baktinya pada VOC.

Sultan Agung yang menjadi penguasa terbesar Mataram, mempunyai dua istri, yaitu Ratu Kulon yang merupakan putri Sultan Cirebon (Panembahan Ratu Cirebon I) dan Ratu Wetan, putri Bupati Batang. Sesaat sebelum wafatnya Sultan Agung, sejatinya keluarga Cirebon juga menjadi salah satu pihak yang mengklaim pewaris tahta Mataram, sebab salah satu putra dari Sultan Agung berasal dari ibu putri Cirebon. Secara status, Ratu Kulon lebih tinggi posisinya dari Ratu Wetan, sebab Ratu Wetan hanya berasal dari kaum bangsawan rendah. Namun dalam intrik suksesi politik di istana Mataram, anak dari Ratu Wetanlah, yang menjadi Susuhunan Amangkurat I. Faksinya berhasil menyingkirkan pengaruh kuat dari Pangeran Syahwawrat yang merupakan anak dari Ratu Kulon.<sup>7</sup> Selama berlangsungnya konflik antara Mataram-VOC dalam pengepungan Batavia pada tahun 1627-1629, Cirebon berupaya agar bersikap netral terhadap VOC dan Mataram, buktinya adalah surat Sultan Cirebon kepada pejabat VOC dengan meminta kapal-kapal perang VOC

---

<sup>7</sup>Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*, hlm.

yang melalui pelabuhan Cirebon, agar menembaki kota Cirebon dengan meriam kosong, sehingga Mataram akan mengira VOC juga bermusuhan dengan Cirebon.<sup>8</sup>

Setelah kekalahan suksesi politik pada tahun 1646, Cirebon menjadi enggan kembali berpolitik melawan Susuhunan Amangkurat I. Cirebon selalu berupaya menghindarkan diri dari gejolak politik di Mataram. Hal itu terbukti dari keengganannya membantu Susuhunan Amangkurat I dalam menghadapi pemberontakan Trunojoyo (1670-1678) dan berpalingnya Cirebon kepada VOC. Walaupun Susuhunan Amangkurat I mungkin juga meminta bantuan saudaranya (Panembahan Ratu Cirebon II adalah menantu Amangkurat I) dari Cirebon, tetapi untuk memasukinya Susuhunan Amangkurat I harus melalui ajudannya, yaitu bupati Tegal hingga kematiannya dalam pelariannya di wilayah Tegal di tahun 1677.<sup>9</sup>

Selama konflik yang terjadi terus menerus di istana Mataram, Cirebon tetap bersikap netral di depan mata penguasa Mataram, tetapi di belakang bersikap berbeda. Cara Cirebon bersikap ditunjukkan dengan tetap hadir dalam kewajiban *seba* di Kraton Mataram setiap tahunnya.

Para Pangeran (bangsawan) dari Cirebon juga belajar (*magang*) dan

---

<sup>8</sup> Ambary, *Tinjauan Akeologis dan Historis Kebudayaan Indonesia*, hlm. 120.

<sup>9</sup>H.J. de Graaf, *Disintegrasi Mataram Di Bawah Mangkurat I*, terj. Pustaka Grafitipers dan KITLV, (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1990), hlm. 181.



menetap untuk beberapa waktu di istana Mataram, sebelum dia diangkat menjadi wakil Mataram.<sup>10</sup>

Pemberontakan dari Surapati yang terjadi sejak tahun 1680 hingga 1710, kemudian menyeret Mataram menjadi negara protektorat di bawah VOC. Secara otomatis negara protektorat Mataram juga menjadi protektorat VOC seperti halnya Cirebon dan Sumedang. Penyerahan daerah sepanjang timur Pamanukan dari Mataram ke VOC pada tahun 1678 sebagai gadaian, membuat penguasa daerah itu, yaitu Pangeran Gerang, sudah meminta VOC agar daerahnya dipisahkan dari Cirebon pada tahun 1681, padahal dia tidak pernah meminta izin pada Susuhunan Amangkurat II. Hal itu disetujui juga oleh VOC, meskipun daerah itu masih di bawah kekuasaan Mataram.

Lepasnya relasi Cirebon-Mataram terjadi dalam dua buah babak. Babak pertama yaitu saat terjadi pemberontakan Trunojoyo, yang menjadikan wilayah kekuasaan Cirebon menjadi jaminan Mataram dengan sistem gadai kepada VOC dan babak kedua, yaitu saat naik tahtanya Susuhunan Pakubuwono I 1710-1718.<sup>11</sup> Raja Mataram ini menganggap

---

<sup>10</sup> Keadaan tersebut tetap dilakukan, bahkan hingga kraton Mataram berpindah dari Kerto, Plered hingga Kartasura.

<sup>11</sup> Sebelum bergelar Susuhunan Pakubuwono I, dia adalah orang yang bernama Pangeran Puger, anak dari Susuhunan Amangkurat I. Pangeran Puger ikut mengklaim tahta sejak tahun 1680, namun dianulir oleh VOC karena Susuhunan Amangkurat II (kakak Pangeran Puger) telah naik tahta Mataram menggantikan ayahnya pada tahun 1678. Hingga tahun 1691 saat Susuhunan Amangkurat II wafat, dia tetap mengklaim tahta itu dengan manghasud Susuhunan Amangkurat III, berkomplot dengan pemberontak Untung Surapati melawan VOC (pemberontakan Untung Surapati terjadi sejak tahun 1686 hingga tahun 1710). Akhirnya dalam perebutan tahta Pangeran Puger berhasil mengalahkan Susuhunan Amangkurat III sejak tahun 1705. Meskipun begitu, Pangeran Puger baru dilantik menjadi raja

bahwa Cirebon menjadi bagian dari penyerahan janji saat dia naik tahta dengan bantuan VOC. Susuhunan Pakubuwono I yang atas bantuan VOC duduk di atas tahta Mataram, tahu bahwa para bangsawan Cirebon dengan bantuan Banten melalui Sultan Ageng Tirtayasa, berkolusi dengan pemberontak Trunojoyo melawan Mataram.<sup>12</sup>

Pada akhirnya relasi antara Cirebon dengan Mataram, harus berakhir karena keputusan politik pada tahun 1705. Cirebon diserahkan oleh Mataram kepada VOC sebagai kompensasi bantuannya terhadap tahta Mataram. Sedangkan Cirebon mulai saat itu, sudah tidak lagi mengabdikan kepada Mataram. VOC bahkan mendudukkan Sultan Cirebon sebagai pihak tertinggi penguasa Pribumi di daerah Pasundan. Di kraton Cirebonlah para penguasa daerah seperti Sumedang, Ukur (Bandung), Galuh, Limbangan, dan Sukapura, menyatakan sumpah setia kepada VOC.<sup>13</sup>

## **B. Permasalahan**

Penelitian ini dianggap menarik karena terjadi suatu hal yang unik dalam sejarah relasi bilateral, yaitu: mengapa dua entitas politik dapat terjadi relasi politik, bagaimana kedua belah pihak mengelola relasi tersebut, apa saja hal-hal yang mengganggu relasi tersebut dan bagaimana

---

Mataram pada tahun 1710 oleh VOC di Semarang, dengan gelar Susuhunan Pakubuwono I yang memerintah Mataram antara tahun 1710-1718.

<sup>12</sup>*Babad Trunojoyo-Suropati*, terj. Balai Pustaka, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 53.

<sup>13</sup>A. Sobana Hardjasaputra, "Bupati di Priangan, Kedudukan dan Peranannya Pada Abad Ke-17-Abad Ke-19" dalam, A. Sobana Hardjasaputra (ed.), *Bupati Di Priangan dan Kajian Lainnya Mengenai Budaya Sunda*, (Bandung: Yayasan Pusat Studi Sunda, 2004), hlm. 31.

akhir dari relasi tersebut. Keunikan peristiwa sejarah ini, nyatanya terjadi dalam suatu babakan peristiwa sejarah politik di pulau Jawa selama rentang waktu tahun 1613 - 1705. Hal itulah yang menjadi salah satu pemicu perlunya diadakan penelitian ini.

### **1. Pokok Masalah**

Hubungan yang terjadi antara Cirebon dan Mataram berlangsung pasang surut. Ada tiga hal yang menjadi pokok bahasan penelitian dalam sejarah relasi tersebut, yaitu; *pertama* soal politik, *kedua* soal ikatan perkawinan dan *ketiga* soal sosio-religius.

Persoalan pertama dalam melihat relasi tersebut adalah kebijakan penguasa Mataram, yang ingin menguasai pulau Jawa. Pada sisi lain Banten dan VOC di Batavia menolak mengakui hal tersebut. Cirebon yang dianggap sebagai pusat kekuatan Mataram di bagian barat, bertindak sebagai mediator bagi kebijakan Mataram, terutama pada masa Panembahan Ratu I dan Panembahan Ratu II sebagai wakil Mataram. Pada bidang politik pula Cirebon dianggap bukan daerah propinsial oleh Mataram melainkan daerah vassal atau protektorat, oleh karena itu sifat daerahnya bukan setingkat Kabupaten dengan jabatan kepala daerahnya bupati, tetapi lebih dari itu. Inilah masa pasang relasi antara Cirebon dengan Mataram.

Masa surut relasi politik terjadi setelah munculnya pemberontakan Trunojoyo yang memporak-porandakan Mataram, antara tahun 1670-1678. Hingga tahun 1680 sifat protektoratnya Mataram atas Cirebon penuh

secara *de facto* dan *de jure*, tetapi setelah tahun itu secara *de facto* Cirebon sudah bukan lagi daerah protektorat Mataram dan menjadi protektorat VOC. Baru setelah tahun 1705, secara *de jure*, Mataram melepaskan hak protektoratnya terhadap Cirebon pada Mataram, sebagai balas jasa bantuan VOC atas kenaikan tahta Mataram oleh Sunan Pakubuwono I.

Pada pokok pembahasan kedua, terjadinya relasi juga terbentuk dari ikatan kekeluargaan melalui perkawinan, yang tentu juga bermuatan politik. Sejak masa Sultan Agung hingga masa Amangkurat I, relasi antara Cirebon dengan Mataram terjalin dengan sangat erat. Sultan Agung menikahi putri Panembahan Ratu I, yaitu Ratu Ayu Sakluh, dan melahirkan pewaris tahta Sunan Amangkurat I. Kemudian Panembahan Ratu II menjadi menantu Sunan Amangkurat I, dengan menikahi putri dari Sunan Amangkurat I, Ratu Ayu Mataram, dan melahirkan tiga putra, Pangeran Kartawijaya, Pangeran Martawijaya dan Pangeran Wangsakerta.

Meskipun kemudian keturunan Cirebon selanjutnya tidak menjadi pewaris tahta Mataram, tetapi hak atas tahta Mataram dari garis keluarga Cirebon masih tetap berlaku. Hanya gangguan pemberontakan dan Bantenlah, relasi Cirebon dengan Mataram dalam jalinan perkawinan tidak lagi berlanjut, sebab setelah tahun 1680 hingga tahun 1705, tidak ada lagi relasi perkawinan antara keluarga Cirebon dengan Mataram.

Pokok bahasan terakhir adalah terjadinya relasi di bidang sosio-religius antara Cirebon dengan Mataram. Para penguasa Cirebon adalah pihak yang amat mempengaruhi Mataram, terutama soal pendidikan dan



religius. Beberapa hal yang dibawa dari Cirebon, digunakan oleh Mataram demi keagungannya sendiri, lalu kemudian dikembalikan dan disebarluaskan di seluruh wilayah kesultanan. Sebagai contoh misalnya tata kota, etika, arsitektur bahkan hingga perangkat kebesaran derajat untuk mengangkat wibawa raja Mataram sebagai pengklaim penguasa besar di pulau Jawa.

Pada bidang religius, penguasa Mataram, terutama Sultan Agung, memanfaatkan derajat tinggi dari keluarga Cirebon sebagai keturunan wali Sunan Gunung Jati, untuk menambah dan menjaga kewibawaan religius raja. Sultan Agung menganggap penguasa Cirebon sebagai yang tertinggi derajat religiusnya, bahkan menganggap Panembahan Ratu I sebagai guru spiritualnya. Cirebon tetap aman dan menjadi lebih meningkat derajatnya, setelah dihancurkannya kewibawaan religius Giri oleh Mataram di tahun 1638. Pembangunan kompleks pemakanan raja Mataram juga meniru gaya dari Cirebon, yaitu berada di atas bukit. Namun relasi di bidang tersebut menjadi surut dan bahkan menjadi hilang sama sekali, setelah Sunan Amangkurat I tidak lagi berafiliasi mengenai kegiatan sosio-religius dengan Cirebon. Para penggantinya pun telah kehilangan pijakan mengenai hal ini.

Pokok-pokok bahasan di atas mencerminkan keadaan pasang surutnya relasi antara Cirebon dengan Mataram. Berbagai peristiwa dari awal hingga berakhirnya relasi antara Cirebon dengan Mataram, ikut mempengaruhi relasi tersebut. Hingga pada akhirnya relasi antara Cirebon

dengan Mataram terputus sama sekali karena masalah politik, tetapi ikatan kekeluargaan, masih tetap terjalin hingga saat ini, keluarga kesultanan Cirebon terdapat darah Mataram dan begitu pula sebaliknya.

## 2. Batasan Masalah

Setiap penelitian mempunyai batasan agar pembahasannya tidak melenceng dan melebar. Pada penelitian sejarah mempunyai dua batasan, yaitu batasan spasial dan temporal.<sup>14</sup> Batasan spasial berkaitan dengan masalah relasi atau hubungan antara dua kesultanan, yaitu kesultanan Cirebon dan kesultanan Mataram, terbatas pada wilayah Cirebon dan Mataram secara khusus. Batasan spasial juga berkaitan dengan masalah struktur maupun relasi yang bersifat timbal balik politik antara ke dua belah pihak.

Batasan temporal berkaitan dengan awal waktu terjadinya sebuah peristiwa dua relasi politik antara Cirebon dan Mataram. Tahun 1613 diambil karena tahun tersebut adalah awal terjadinya relasi, baik yang bersifat sepihak maupun kedua belah pihak. Penegertian sepihak diartikan dengan kebijakan politik Mataram terhadap Jawa pada umumnya dan terhadap Cirebon khususnya. Kebijakan kedua belah pihak dengan arti apa yang terjadi dalam relasi tersebut, baik timbal baliknya maupun bentuk relasi tersebut. Tahun 1705 diambil karena sangat berkaitan dengan akhir relasi antara Cirebon dan Mataram, yaitu ketika Cirebon sudah bukan lagi

---

<sup>14</sup>Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 15.

bagian dari Mataram dan langsung di bawah kekuasaan VOC. Maka dengan hal tersebut, antara Cirebon dan Mataram sudah tidak lagi punya hubungan secara politik, meskipun secara kekeluargaan masih terikat erat.

### 3. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan pokok studi (*big question*) ini adalah bagaimana relasi antara Cirebon Mataram pada Tahun 1613 – 1705. Adapun sub pertanyaan studi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk - bentuk relasi antara Cirebon dan Mataram?
2. Bagaimana terjadinya pasang surut relasi Cirebon dan Mataram?
3. Bagaimana akhir dari relasi antara Cirebon dan Mataram?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan utama skripsi ini adalah untuk mengetahui hal berikut:

1. Ingin menjelaskan dinamika hubungan Cirebon Mataram Abad ke 17.
2. Ingin mengungkapkan hubungan timbal-balik antara kedua belah pihak dari relasi tersebut.
3. Ingin menjelaskan bagaimana akhir dari relasi tersebut akibat peristiwa-peristiwa yang mengganggu relasi politik antara Cirebon dan Mataram.

Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu:

1. Menambah wawasan para pembaca, khususnya kesejarahan terkait dengan relasi Cirebon Mataram pada Tahun 1613-1705.

2. Memberikan sumbangan hasil karya penelitian bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada umumnya dan Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) pada khususnya.
3. Memberikan informasi terkait hubungan perkawinan, politik dan sosial keagamaan antara Cirebon dan Mataram

#### **D. Landasan Teori**

Penelitian ini bertema sejarah politik dengan fokus kajian tentang relasi bilateral. Berkaitan dengan tema sejarah politik tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian sejarah ini adalah pendekatan politik. Pendekatan dengan ilmu politik, digunakan untuk melihat kebijakan politik, struktur kekuasaan dan peranannya dalam hubungan relasi politik di kawasan regional.<sup>15</sup>

Untuk menggunakan pendekatan tersebut, dibutuhkan perangkat yang digunakan untuk mengupas peristiwa sejarah politik, agar peristiwa sejarah yang diteliti tidak melenceng dari kaidahnya. Kaidah ilmu politik digunakan dalam kerangka penelitian sejarah ini, karena dengan bantuan ilmu tersebut, penelitian sejarah tidak hanya terbatas pada sejarah naratif semata, tetapi akan menjadi sejarah yang bersifat deskriptif-analitik.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 43.

<sup>16</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996).



Setelah menetapkan pendekatan dalam penelitian sejarah ini, maka untuk mengarahkan penelitian ini, dibutuhkan teori yang dapat diterapkan agar penelitian ini terarah dan terfokus. Meminjam teori C.P Loemis yang menyangkut adanya interaksi antar golongan dalam sebuah masyarakat regional. Menurutnya ada empat poin utama dalam teori interaksi sosial yang dicetuskannya, yaitu; 1). Adanya jumlah pelaku lebih dari dua, 2). Penggunaan simbol-simbol dalam berkoneksi dan berkomunikasi, 3). Terjadi dalam sebuah dimensi ruang dan waktu, 4). Tujuan menjadi pokok utama visi dalam praktek kehidupan.<sup>17</sup> Adanya interaksi antara dua entitas politik, mencerminkan saling keterkaitan. Satu pihak membutuhkan pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Interaksi dalam relasi, tidak hanya terbatas pada satu sisi saja, namun terjadi proses timbal balik, sehingga dapat dijumpai sisi-sisi lain yang mengalami proses interaksi. Interaksi tersebut, dapat berwujud material maupun immaterial, seperti arsitektur, pakaian dan perangkat lainnya, sedangkan dalam bentuk imaterial, dapat berbentuk bahasa dan aturan etiket.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian tentang Cirebon dan Mataram telah banyak ditulis, namun untuk fokus relasi antara Cirebon dan Mataram, belum ada yang secara komprehensif ditulis, baik terutama dalam penelitian berbentuk skripsi,

---

<sup>17</sup> Alvin L. Bertrand, *Sosiologi, Kerangka Acuan, Metode Penelitian, Teori-teori Tentang Sosialisasi, Kepribadian dan Kebudayaan*, terj. Sanapidh S. Faisal, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), 20-26.

tesis maupun disertasi. Sepanjang peneliti mencari, belum ditemukan hasil penelitian berbentuk hal tersebut di atas dan hal itulah yang menjadi celah kajian bagi peneliti, untuk mengambil tema tersebut sebagai fokus kajian.

Adapun salah satu tulisan dalam bentuk pustaka berupa buku, di antaranya: buku Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau, Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*. Buku ini membahas tentang perjalanan kekuasaan kesultanan Mataram II (Mataram Islam), yang memuat tentang bagaimana sistem pemerintahan Mataram dijalankan sejak berdirinya hingga akhir pemerintahan Kolonial dan datangnya Jepang. Karya itu juga mengulas tentang usaha-usaha dari penguasa (raja) secara personal, dalam memperlihatkan dan mempertahankan kekuasaan, kebesaran, kemegahan dan kekuatan negaranya. Perbedaan yang utama dengan penelitian ini, adalah masalah temporal serta fokus utamanya yaitu masalah relasi antara Cirebon dan Mataram.<sup>18</sup>

Karya tulis selanjutnya berjudul; *Konsep Kekuasaan Jawa, Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram*, karya G. Moedjanto. Buku tersebut menjelaskan tentang konsep-konsep kekuasaan di Jawa baik secara umum maupun khusus. Secara jelas buku ini juga menjelaskan bagaimana sistem serta penerapannya pada kekuasaan Jawa oleh raja-raja

---

<sup>18</sup>Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Pada Masa Lampau, Studi Tentang Mataram II Abad XVI-XIX*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985).

Mataram. Karya ini hanya membahas tentang sistem dan konsep suksesi saja, termasuk di dalamnya polemik suksesi Pangeran Syahwawrat.<sup>19</sup>

H.J. De Graaf dengan karyanya berjudul *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, terj. Pustaka Utama Grafiti dan KITLV, buku tersebut menjelaskan tentang Mataram di abad ke-17, seperti tentang awal berdirinya Mataram, sejarah ekspansi Sultan Agung dan perpecahan Mataram di bawah Amangkurat I.<sup>20</sup>

Tulisan dari Uka Tjandrasasmita, mengulas tentang keadaan perekonomian Cirebon, sejak masa kuno hingga masa Kolonial. Di dalam buku ini juga disinggung tentang relasi antara Cirebon dengan Mataram, sekalipun tidak banyak.<sup>21</sup> Buku yang terakhir adalah karya Susanto Zuhdi, *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, di dalamnya ada hal menarik dimana terdapat sedikit ulasan tentang relasi Cirebon dan Mataram. Secara *de jure* sejak tahun 1681 Cirebon masih menjadi protektorat Mataram, namun secara *de facto* sudah berada di bawah pengaruh VOC. Hingga tahun 1705, saat Mataram secara *de jure* melepaskan Cirebon dari wilayah kekuasaan Mataram.<sup>22</sup>

<sup>19</sup>G. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994).

<sup>20</sup>H.J. de Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, terj. Pustaka Utama Grafiti dan KITLV, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990) dan H.J. de Graaf, *Disintegrasi Mataram Di Bawah Mangkurat I*, terj. Pustaka Grafitipers dan KITLV, (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1990).

<sup>21</sup> Uka Tjandrasasmita, *Keadaan Ekonomi Politik Kerajaan Cirebon*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1996).

<sup>22</sup>Susanto Zuhdi, *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1996).

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) penelitian yang sumber datanya dari sumber tulisan. Louis Gottschalk membagi 4 tahap dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu: pemilihan subyek (topik), pengumpulan sumber (heuristik), pengujian sumber (verifikasi), dan penafsiran (interpretasi), dari keempat tahap tersebut akan berakhir pada penulisan (historiografi) sejarah.<sup>23</sup>

Metode penelitian sejarah adalah cara-cara untuk mencari gambaran menyeluruh tentang peristiwa sejarah, dalam kurun waktu tertentu di masa lalu, yang terbagi dalam beberapa tahapan dan proses tertentu sesuai kaidah. Oleh karena mengacu pada sumber tertulis, maka penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada bahan-bahan tertulis.<sup>24</sup>

Menurut Kuntowijoyo, penelitian sejarah mempunyai lima tahapan, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan penulisan.<sup>25</sup> Tahapan pertama adalah pemilihan topik, dan dalam hal ini adalah sejarah politik. Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan sumber (*heuristik*) yang terkait dengan objek, berupa sumber-sumber primer dan

---

<sup>23</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah Pengantar Metode Sejarah*, terj Nugroho Notosusanto (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 34.

<sup>24</sup>Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7-8.

<sup>25</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hlm.89.



sekunder. Adapun sumber primer berupa *babad* dan beberapa salinan perjanjian semasanya atau catatan asing seperti *daghregister* milik VOC, koleksi perpustakaan DKI Jakarta, Adapun sumber sekunder berupa buku-buku, catatan-catatan lepas, maupun artikel-artikel yang telah ditulis.

Sumber-sumber tersebut peneliti dapatkan dari beberapa perpustakaan, seperti di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan dan depot Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan DKI Jakarta, Perpustakaan Museum Sri Baduga di Sumedang, Perpustakaan Kraton Yogyakarta di Museum Sonobudoyo dan Museum Kraton Kasepuhan Cirebon.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber (verifikasi). Kritik tersebut meliputi kritik intern maupun ektern yang berguna untuk menguji seluruh bagian dari tulisan yang menjadi bahan untuk kajian. Kritik ekstern berfungsi untuk melihat sisi luar teks, seperti gaya tulisan, bahasa, kalimat, kertas dan yang lainnya. Sedangkan kritik intern digunakan untuk menelaah isi teks dan membandingkannya dengan teks lain untuk memperoleh data yang autentik.

Sumber-sumber yang digunakan oleh peneliti meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber sezaman yang ditulis oleh kesultanan ataupun sumber asing. Sumber yang ditulis kesultanan berupa *babad*, misalnya *Babad Sengkalaning Mommana*, *Babad Sultan Agung* serta *Babad Trunojoyo-Suropati*. Beberapa hal dalam sumber

*babad* tersebut memang ada yang memuat tentang relasi antara Cirebon dan Mataram, Sedangkan tulisan dari kesultanan Cirebon sendiri berupa naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari*. Naskah tersebut ditulis oleh Pangeran Wangsakerta pada abad ke-17, sayang hanya sedikit sekali yang memuat informasi tentang relasi antara Cirebon dan Mataram. Penggunaan sumber *babad* hanya sedikit digunakan oleh peneliti, karena sedikit sekali yang memuat informasi tentang relasi antara Cirebon dengan Mataram.

Sumber asing yang terpenting, adalah catatan dari VOC berupa *daghregister*. Catatan tersebut penting dalam melihat relasi, tetapi harus dicermati, karena catatan ini tidak memuat hal-hal yang prinsipil dan sifatnya hanya sebagai pengamatan saja, serta hanya catatan perdagangan semata. Meskipun begitu, sajian informasi dari sisi kronologis, sumber dari *daghregister* lebih dapat dipercaya ketimbang sajian informasi sumber *babad*.

Kritik dalam penelitian sumber itu sangat berguna bagi peneliti untuk menguji valid atau tidaknya sebuah sumber. Pengujian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan dengan kritik terhadap kredibilitas pengarang. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data primer dan sekunder yang disajikan antar sumber *babad* dan *daghregister*, serta dalam buku, peneliti lebih berkecenderungan menggunakan sumber dari *daghregister*, terutama soal kronologis yang lebih baik.

Selanjutnya adalah interpretasi atau pengolahan data dengan analisis dan sintesis terhadap masalah yang didapat dari data. Langkah interpretasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu: dengan memilah data yang tersaji, mana menjadi fokus bagian dari isi skripsi dan mana yang bukan menjadi bagian. Interpretasi dilakukan oleh peneliti, untuk menemukan fakta yang terjadi sesungguhnya, dengan bantuan logika.

Sebagai langkah terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi, yakni penyusunan data menjadi fakta dalam bentuk tulisan, sesuai dengan metode penulisan yang berlaku saat ini. Historiografi dalam skripsi ini, tersusun dan tertuang di tiga bagian utama, mulai dari pendahuluan, isi hingga kesimpulan. Kaidah dalam bahasa Indonesia berupa tanda baca, penyusunan kalimat dan format penulisan, sedapat mungkin disesuaikan dengan kaidah dalam bahasa Indonesia yang berlaku saat ini.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebuah peristiwa sejarah yang diteliti dengan metodologi dan pembagian babakan, harus dibagi sesuai sistematika serta kaidah dalam penelitian sejarah. Pembabakan tahapan pembahasan cerita peristiwa sejarah, dapat dibagi dalam beberapa bab dan sub-bab, yang sifatnya tidak mengikat dan tidak dibatasi jumlahnya. Pada penelitian sejarah, sebuah peristiwa sejarah selalu didasarkan pada kaidah dasar, yaitu awal, saat dan akhir peristiwa.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, hlm. 69.

Pembabakan deskripsi peristiwa sejarah pada penelitian ini, terbagi ke dalam empat bahasan berbentuk bab. Adapun bagian pembahasannya yaitu:

Bab I adalah pendahuluan, dalam arti proposal penelitian. Bagian ini mengulas tentang bagaimana proses penelitian itu dilakukan, untuk apa dilakukan penelitian, untuk tujuan apa penelitian dilakukan, dengan cara yang bagaimana proses penelitian ini dijalankan. Pada bagian ini, peneliti diarahkan konstruksi berfikirnya melalui kaidah dan acuan berfikir, untuk seluruh proses penelitian.

Bab II adalah gambaran umum tentang obyek bahasan. Hal ini penting untuk dikemukakan, sebab penelitian sebuah cerita peristiwa sejarah tidak mungkin dapat dilaksanakan, tanpa mengetahui latar belakang obyeknya. Pada bagian ini terbagi dalam empat bagian, yaitu masalah geografis, politik, ekonomi dan agama. Bagian ini akan mengantarkan kepada bagian yang selanjutnya.

Kelanjutan dari pembagian penelitian dari bab sebelumnya, diwujudkan pada proses pembahasan yang ada di bab III. Bab III terbagi dalam tiga bagian, masing masing bagian menggambarkan tentang bagaimana saat proses relasi antara Cirebon dan Mataram itu berlangsung serta bagaimana wujudnya. Adapun pembagiannya yaitu; proses terjadinya relasi, kebijakan salah satu pihak dalam hubungan relasi dan wujud relasi dari kedua belah pihak. Kelanjutan proses pembahasan di bagian ini akan dibahas pada bab IV.



Bab IV yang merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya, membahas tentang bagaimana terjadinya penurunan aktifitas dari relasi antara dua buah entitas politik, yaitu Cirebon dan Mataram, dengan kata lain akhir dari sebuah peristiwa sejarah relasi kedua belah pihak. Adapun pembahasannya terbagi dalam tiga bagian, dengan masing-masing bagian menjelaskan tentang posisi relasi kedua belah pihak, yang ditandai oleh berbagai macam hal yang mempengaruhi relasi tersebut, yaitu: tindakan oleh salah satu pihak sebagai penyeimbang pihak lain, masalah yang terjadi dalam hubungan relasi dan bagaimana relasi itu dapat berakhir. Pada bagian ini penelitian mencapai puncaknya dan akan di fokuskan analisisnya pada bab selanjutnya.

Skema babakan penelitian suatu tema sejarah, pasti tiba dalam suatu akhir pembahasan. Bab V adalah akhir dari seluruh proses penelitian ini, di dalamnya berisi tentang analisa dan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan proses penelitian ini. Bagian inilah yang menjadi akhir dari seluruh rangkaian penelitian, tentang pembahasan suatu tema dari sebuah peristiwa sejarah.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**CIREBON SEBELUM RELASI DENGAN MATARAM**

**A. Kondisi Geografis**

Wilayah Cirebon berada pada wilayah yang terletak di antara tanah Pasundan dan Pesisir. Secara etnografis, aktifitas orang-orang Cirebon berada di wilayah yang beretnik Sunda dan Jawa di bagian Pesisir.<sup>27</sup> Jadi wilayah Cirebon adalah perpaduan dan pertemuan, antara budaya Sunda dan budaya Jawa. Wilayah Cirebon secara geografis terletak pada lintang utara 108 °, 35 bujur timur dan 9 °, 30 lintang selatan.<sup>28</sup>

Wilayah pesisir secara tradisional selalu berhubungan dengan hasil-hasil laut, baik di pantai utara maupun pantai selatan. Pada wilayah pantai utara yang ombaknya tenang dan lautnya yang landai, membuat pesisir utara menjadi tempat tumbuh peradaban kuno hingga modern pulau Jawa, sejak masa Hindu-Buddha hingga Islam. Sedangkan pantai selatan secara geografis, menjadi wilayah yang tidak berkembang, karena untuk menjangkaunya melalui laut, kapal-kapal sangat sulit berlabuh karena ombaknya yang besar dengan pantai yang berbatu karang tajam dan terjal,

---

<sup>27</sup> Hiroyoshi Kano, "Sejarah Ekonomi Masyarakat Pedesaan Jawa: Suatu Penafsiran Kembali", dalam Akira Nagazumi (peny.), *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang, Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), hlm. 14-15.

<sup>28</sup> Adeng, Dkk., *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998), hlm. 9.

sehingga membahayakan perjalanan laut, kecuali di wilayah Cilacap yang terlindung oleh pulau Nusakambangan.<sup>29</sup> Cirebon sendiri wilayahnya berada di wilayah pesisir pantai utara Jawa dan dinyatakan sebagai negeri bahari.

Secara umum wilayah Cirebon berada di atas tanah *alluvial* dan *regosol*, yaitu tanah hasil endapan lumpur yang dibawa oleh sungai yang mengalir di sekitar wilayah Cirebon. Endapan lumpur tersebut membawa material vulkanis dari gunung Ciremai dan gunung Galunggung. Wilayah selatan Cirebon terbentang jajaran pegunungan dan puncak tertinggi berada di gunung Ciremai. Sedangkan wilayah yang agak datar di sebelah selatan, berada di timur laut kota Cirebon, tepatnya berada di daerah Ciledug.<sup>30</sup>

Sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Cirebon yaitu sungai Cisanggarung, Cimanuk, Citarum, Cilosari dan sungai Cipunegara. Semua bermuara di pantai utara pulau Jawa. Umumnya sungai tersebut dapat dimasuki hingga beberapa kilometer dari garis pantai. Kondisi alam tersebut, menyebabkan tanah di Cirebon umumnya sangat subur dan dapat ditanami tanaman pangan sepanjang tahun.<sup>31</sup> Cirebon adalah salah satu daerah di pulau Jawa, yang dianugerahi bentang alam yang begitu baik, di utara terdapat kekayaan laut dengan pantai yang landai, di bagian selatannya terdapat formasi gunung berapi dengan semburan debu vulkanisnya.

---

<sup>29</sup> Susanto Zuhdi, *Cilacap (1830-1942): Bangkit dan Runtuhnya Satu Pelabuhan di Jawa*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000), hlm. 12.

<sup>30</sup> Tony Whitten, Roehayat Emon Soeriaatmadja, Suraya A. Afif, *The Ecology Of Indonesia Series, Volume II; The Ecology of Java and Bali*, (Hongkong: Periplus Editions Ltd, 1996), hlm. 31 dan 236.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

Sehingga di zaman itu dapat dinyatakan bahwa Cirebon adalah daerah penghasil komoditas pangan yang paling baik.

Sebelum penguasaan Mataram (1613), seluruh daerah di pantai utara dari Karawang hingga sungai Cipamali di Brebes, menjadi kekuasaan Cirebon. Sebelum itu bahkan hingga mencapai Jayakarta dan Banten di tahun 1527. Setelah tahun 1552, Banten berdiri sendiri dan Jayakarta berada di bawah pengawasan Banten. Setelah tahun 1613, wilayah Cirebon hanya meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan Galuh (Ciamis). Sedangkan wilayah Karawang, Sumedang dan Ukur (Bandung), dikuasai oleh Mataram di bawah pengawasan Sumedang.

Jalan menuju Cirebon dapat ditempuh dengan moda transportasi darat dan laut. Untuk menuju Cirebon dari pusat pemerintahan di Mataram, dapat ditempuh melalui jalan darat lewat Tegal, Banyumas, lalu ke arah timur melalui Mangir. Sedangkan jalan darat kedua, melalui Pekalongan dan Batang, lewat Kedu dan Trayem (Boyolali). Apabila perjalanan dilakukan melalui laut, perjalanan dapat dilakukan melalui pelabuhan Semarang, Kendal ataupun Batang, lalu diteruskan dengan transportasi darat melalui Kedu atau Trayem. Lama perjalanan ke ibukota Mataram dari Cirebon sekitar 8-9 hari jika lewat jalan darat, jika melalui jalur laut, perjalanan memakan waktu sekitar 6-8 hari, sehari perjalanan laut dari Cirebon ke



Semarang atau Kendal, lalu dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan kuda atau cikar.<sup>32</sup>

Jalan menuju Banten atau Jayakarta, dapat ditempuh melalui jalur laut, sebab jalur darat harus memutar melalui Galuh, Sumedang, Cianjur dan Pakuan.<sup>33</sup> Butuh waktu selama hampir dua minggu untuk sampai ke Banten atau Jayakarta. Jika melalui jalur laut, perjalanan dapat dipangkas hingga 2-3 hari perjalanan.

## **B. Kondisi Politik**

Sepanjang perjalanan Cirebon menjadi sebuah kesultanan, beberapa kali Cirebon telah melampaui masa beberapa kesultanan besar sebelum Mataram. Di bidang politik, Cirebon juga berada di dua sisi yang berbeda, di satu sisi sebagai pewaris kesultanan Pajajaran, di sisi lain sebagai pewaris Demak.

Cirebon sebelum Islam secara politik, dibagi dua, yaitu: Cirebon Larang yang berada di pesisir dan Cirebon Girang yang berada di pedalaman. Cirebon Girang dipimpin oleh, Ki Gedeng Kusmaya, dan Cirebon Larang dipimpin oleh Ki Gedeng Jumajan Jati.

Silsilah Cirebon yang dirunut dari Pajajaran, agak sulit dikoneksikan dengan baik, karena cerita-cerita yang ada banyak versinya. Meskipun begitu semua cerita-cerita yang ada merujuk pada satu titik, yaitu Prabu

---

<sup>32</sup> Mubtadila, *Intervensi VOC Dalam Suksesi di Istana Mataram, 1677-1757*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2015, tidak diterbitkan), hlm. 17-18.

<sup>33</sup> M Sanggupri Bochari dan Wiwi Kuswiah, *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional, Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 42.

Siliwangi sendiri. Pada satu versi cerita, Prabu Siliwangi (Prabu Wastu Kencana) mempunyai seorang istri yang telah menganut Islam, yaitu Nyi Subang Larang, putri Ki Jumajan Jati. Perkawinan tersebut melahirkan dua orang putera dan seorang putri yang bernama Larasantang. Merunut cerita tersebut, sang putri pergi haji bersama kakaknya, di Mekkah sang putri kemudian menikah dengan raja Mesir dan memiliki gelar Syarifah Madaim, sedangkan putranya kembali ke Cirebon.<sup>34</sup>

Versi lain tentang Cirebon adalah, cerita kesultanan Demak menyatakan bahwa Cirebon adalah wilayah kekuasaan Demak, yang dikuasakan kepada Sunan Gunung Jati. Setelah menaklukkan Sunda Kalapa dan Banten pada tahun 1527-1528, seluruh wilayah pesisir Pasundan, berada di bawah kekuasaan Demak dengan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin di wilayah tersebut. Setelah hancurnya Demak di tahun 1546, Cirebon berdiri sendiri sebagai kesultanan yang merdeka. Sedangkan di wilayah timur, Pajang menyatakan diri sebagai pihak yang mewarisi Demak.<sup>35</sup> Cerita versi ini menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah anak dari Sultan Trenggono, di sisi lain adalah menantu Sultan.

Wilayah Cirebon kemudian dibagi dua, satu wilayah di sebelah timur sungai Citarumm, di bawah pengawasan Panembahan Ratu dan di sebelah barat sungai Citarum, di bawah pengawasan Maulana Yusuf (putera Sultan Hasanuddin. Berkuasa pada tahun 1570-1580). Sejak saat itu Banten dan

---

<sup>34</sup> Adeng, Dkk., *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, hlm. 22-24.

<sup>35</sup> Cirebon enggan berada atau bekerjasama di bawah Pajang, karena sang Sultan Pajang menganut Islam Syi'ah. Sultan Cirebon adalah penganut Islam Sunni dengan mazhab Syafi'i dan Hanafi.

Cirebon sudah berdiri sendiri-sendiri. Pakungwati adalah nama lain sebelum nama Cirebon dikenal. Nama tersebut diambil karena Sunan Gunung Jati, mempunyai seorang istri yang bernama Dewi Pakungwati, yang menurunkan penguasa Cirebon setelahnya. Adapun silsilah Sultan-sultan Cirebon dari tahun 1546 hingga 1705 dapat dilihat di lampiran 1.

Pada Kesultanan Cirebon, terdapat satu struktur. Terbentuknya struktur di kraton Cirebon, tidak lepas dari adanya birokrasi untuk mengatur kesultanan. Birokrasi ini tentu berbeda dengan pembentukan struktur birokrasi setelah masuknya pengaruh Mataram di Kesultanan Cirebon. Adapun strukturnya yaitu:

Raja sebagai puncak strata sosial, lalu keluarganya, berturut-turut Putra Mahkota, Ratu dan seluruh keluarganya. Pada tingkat kedua, terdapat patih dan para pembantunya terus ke bawah hingga jabatan terakhir adalah Demang. Strata sosial ini terbentuk hingga awal penguasaan Mataram terhadap Cirebon. Di tahun 1680, Cirebon kemudian menjadi semacam Wedana Bupati, karena Cirebon dipilih sebagai kekuatan yang mengayomi daerah Pasundan oleh VOC. Meskipun terbagi tiga bagian, yang diakui oleh VOC hanya Sultan Sepuh sebagai Wedana Bupati wilayah Pasundan.

### **C. Kondisi Ekonomi**

Perekonomian Cirebon bertumpu pada hasil laut dan hasil bumi. Hasil laut dari Cirebon adalah yang paling utama. Merujuk pada cerita awal pendirian wilayah Cirebon, Cirebon sebagai penghasil udang yang diolah menjadi terasi dan hasil-hasil laut lainnya.

Cirebon dikenal sebagai penghasil beras, sayur mayur, hasil ternak, kayu, minyak dan gula kelapa. Komoditas tersebut dapat dijumpai dari pedalaman. Komoditas tersebut kemudian dijual ke berbagai wilayah di luar Cirebon. Sedangkan komoditas dari pesisir yaitu; hasil-hasil laut, berupa ikan dan garam. Kemudian terdapat juga barang-barang impor seperti keramik, emas, perak, tembaga, timah, sutera dan barang lainnya yang tidak dihasilkan oleh Cirebon sendiri.<sup>36</sup>

Selain komoditas tersebut di Cirebon juga hadir jasa pembuatan dan perbaikan kapal. Sebab di Cirebon kayu-kayu yang dihasilkan dari kawasan hutan di selatan Cirebon, baik mutunya, sehingga kapal-kapal yang hendak berlabuh di Batavia maupun Banten ke wilayah utara atau ke wilayah timur Nusantara, dapat singgah di pelabuhan Cirebon. Perjalanan kapal dari Banten, Batavia menuju wilayah timur, dapat singgah di Cirebon untuk perbaikan ataupun mengambil bekal.

Sejak lama Cirebon dikenal sebagai salah satu tempat masuknya barang-barang mewah. Barang-barang tersebut dijual di wilayah pedalaman Sunda. Dapat dianggap, Cirebon sebelum adanya VOC di Batavia, adalah satu-satunya pelabuhan terbesar yang ada di wilayah pesisir Pasundan. Munculnya Banten dalam kancah perdagangan, kemudian memudarkan Cirebon sebagai bandar dagang yang ada di pantai utara Jawa setelah tahun 1570. Meskipun Cirebon masih tetap eksis sebagai salah satu bandar dagang yang ada di pesisir Pasundan.

---

<sup>36</sup> Bochari dan Wiwi Kuswiah, *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*, hlm. 39.



Banyak pedagang asing yang hilir mudik dari dan ke Cirebon. Salah satu etnis yang tercatat dalam ekspedisi Cheng Ho, adalah telah adanya komunitas muslim di Cirebon, baik berbangsa Tionghoa maupun Arab.<sup>37</sup> Perdagangan Cirebon bahkan hingga mencapai Malaka. Ada seorang kepala pedagang di Malaka yang bernama Patih Kadir, konon berasal dari Cirebon.<sup>38</sup> Uang yang digunakan dalam proses perdagangan, menggunakan mata uang *caixa* atau uang kepeng dari Tiongkok.<sup>39</sup>

#### D. Kondisi Agama

Setelah jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan pasukan Demak dan penaklukan Banten pada tahun 1527-1528, Cirebon telah ada sebagai sebuah entitas politik dan pusat keagamaan Islam yang terpenting di bagian barat pulau Jawa. Pendirinya adalah raja-ulama, yaitu Sunan Gunung Jati.<sup>40</sup>

Setelah runtuhnya Demak pada tahun 1546, praktis Cirebon menjadi salah satu atau bahkan yang terbesar, sebagai pusat penyebaran Islam di tanah Pasundan bagian timur. Berturut-turut ditaklukan oleh Cirebon, yaitu Talaga, Galuh hingga ke daerah Sumedang.<sup>41</sup> Tempat-tempat yang ditaklukan dari kesultanan Pajajaran tersebut, menyebarkan Islam hingga ke pedalaman Sunda. Pada tahun 1579, Banten berhasil menghancurkan

<sup>37</sup> Konon gua Sunyaragi adalah bagian dari bangunan peninggalan dari abad ke-15. Arsiteknya adalah Sam Po Toa Lang. Kong Yuanzi, *Muslim Tionghoa Cheng Ho, Misteri Perjalanan Hibah di Nusantara*, terj. -, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005), hlm. xxvi dan 179.

<sup>38</sup> H.J de Graaf dan TH Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa, Tinjauan Sejarah Politik Abad XV-XVI*, terj. -, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm. 126.

<sup>39</sup> Anthony Reid, *Dari Ekspansi Hingga Krisis Jilid II*, terj. R.Z leirissa dan P. Soemitro, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 77.

<sup>40</sup> Pernyataan dalam wawancara Sultan Kasepuhan PRA Arief Natadiningrat, dalam acara "Jalan-jalan di Cirebon" di TV One pada tanggal 14.11.2016 jam 14.00-15.00.

<sup>41</sup> Adeng, Dkk., *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, hlm. 76.

kekuatan terakhir Hindu Sunda di Pakuan (Bogor).<sup>42</sup> Peristiwa tersebut menandai hadirnya Islam secara masif di tanah Pasundan. Namun begitu, Sunan Gunung Jati memilih untuk pulang ke Cirebon daripada tinggal di Banten pada tahun 1570.<sup>43</sup>

Menurut Sultan Kasepuhan Cirebon PRA Arief Natadiningrat, tradisi keagamaan yang muncul di Cirebon, telah ada sejak zaman kewalian. Cirebon sendiri adalah salah satu pusat kajian Islam yang penting di masa lalu, sehingga dapat dianggap Cirebon adalah penjaga tradisi keislaman yang masih ada dan terus berlangsung hingga saat ini. Menurutnya pula, banyak pusaka-pusaka yang ada di kraton Kasepuhan Cirebon, mencerminkan pengamalan Islam oleh penguasa Cirebon di masa lalu, yang lebih dekat ke ajaran tasawufnya.<sup>44</sup>

Banyak bangunan spiritual di wilayah kraton Cirebon dan sekitar kota Cirebon, dibangun pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, di antaranya sumur 7, kompleks pemakamannya di daerah Gunung Jati dan bangunan lain di luar kota Cirebon seperti masjid di daerah Sumber dan mata air di daerah Kuningan, semua dibangun atas prakarsa Sunan Gunung Jati, sehingga tidak banyak penguasa Cirebon setelahnya, yang membangun kesultanan Cirebon seperti halnya Sunan Gunung Jati.<sup>45</sup>

---

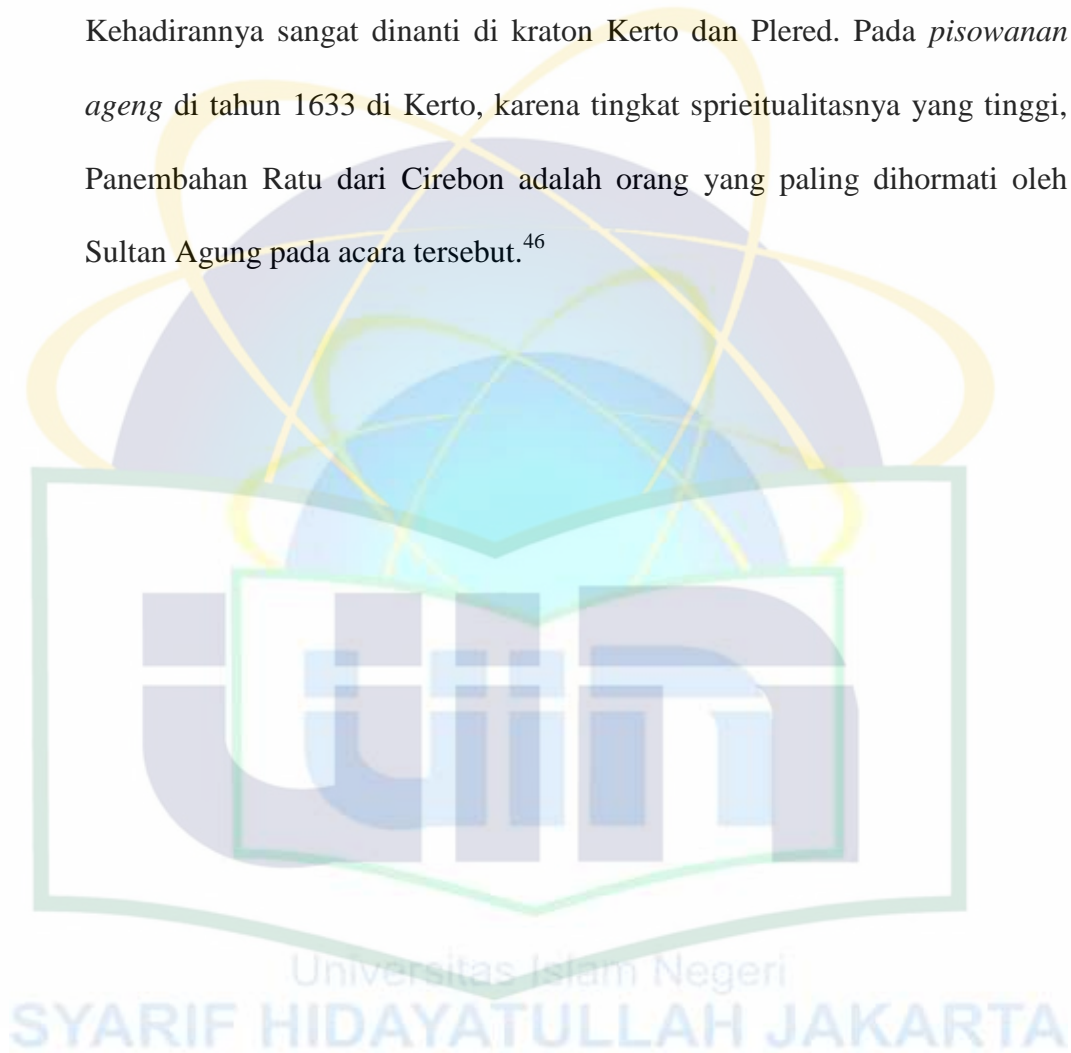
<sup>42</sup> Mundzirin Yusuf (ed.), *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit PUSTAKA, 2006), hlm. 91.

<sup>43</sup> de Graaf, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa, Tinjauan Sejarah Politik Abad XV-XVI*, hlm. 130.

<sup>44</sup> Pernyataan dalam wawancara Sultan Kasepuhan PRA Arief Natadiningrat, dalam acara “Jalan-jalan di Cirebon” di TV One pada tanggal 14.11.2016 jam 14.00-15.00.

<sup>45</sup> Liputan khusus mengenai Kasultanan Cirebon pada acara televisi “On The Spot” di Trans7 pada tanggal 10 dan 11 November 2016 pukul 19.00-19.30 WIB.

Sunan Gunung Jati memerintahkan untuk membuat masjid agung Cirebon yang sama besarnya dengan masjid agung Demak. Anak cucunya yang lain, yaitu Panembahan Ratu I, menjadi guru spiritual Sultan Agung. Kehadirannya sangat dinanti di kraton Kerto dan Plered. Pada *pisowanan ageng* di tahun 1633 di Kerto, karena tingkat sprieitualitasnya yang tinggi, Panembahan Ratu dari Cirebon adalah orang yang paling dihormati oleh Sultan Agung pada acara tersebut.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> H.J de Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, terj. Pustaka Utama Grafiti dan KITLV, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 41.

### **BAB III**

## **BENTUK JALINAN HUBUNGAN ANTARA CIREBON DAN MATARAM**

### **A. Politik Perkawinan**

Politik perkawinan yang dijalankan oleh Mataram terhadap beberapa kekuatan politik di Jawa, salah satunya adalah Cirebon. Politik perkawinan yang dijalankan ini, mempunyai beberapa motif, salah satunya adalah penguasaan dengan cara yang damai, tidak dengan tindakan militer. motif lainnya adalah pengakuan serta penguasaan dengan politik ekonomi serta legitimasi religius.

Upaya Mataram untuk menguasai kawasan Pesisir bagian barat, diwujudkan dalam politik perkawinan dan pendidikan. Politik perkawinan diwujudkan dengan jalinan kekerabatan, antara keluarga inti Mataram dengan keluarga Cirebon. Seringkali hubungan ini tidak imbang, karena Mataram menjadi negara protektorat Cirebon. Penguasa Mataram seringkali juga mencoba untuk mendidik para calon penguasa daerah, dengan cara magang di istana selama ayahnya menjabat sebagai bupati di daerahnya, atau dengan kata lain, menahan sang anak, sebagai jaminan cermin kesetiaan pada penguasa Mataram.

Adapun penjelasan masing-masing bagian, dapat dilihat dari bagian di bawah ini:

## 1. Hubungan Kekerabatan

Hubungan politik dan diplomatik antara Cirebon dan Mataram, sudah terjadi sejak masa Panembahan Ratu I dan Panembahan Senopati. Pada saat itu, Panembahan Senopati membantu Cirebon membangun tembok Kratonnya. Panembahan Senopati mengirim ahli bangunan dan para pekerjanya ke Pakungwati (Cirebon), untuk bekerja. Pihak Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati, yang memandang wilayah Pakungwati (Cirebon, adalah perbatasan Mataram di bagian barat).<sup>47</sup>

Setelah jatuhnya Demak di tahun 1546, serta bedirinya Pajang yang mengklaim diri sebagai pewaris Demak, maka setelah jatuhnya Pajang, Panembahan Senopati buru-buru mengklaim diri sebagai pewaris Demak dan Pajang, termasuk seluruh daerah yang telah menjadi kekuasaan Demak di masa lalu. Dasar pemikiran Mataram tersebut, tidak dikatehui dengan pasti respon dari Panembahan Ratu I, tetapi diketahui tidak ada konflik terbuka antara Cirebon (Pakungwati) dengan Mataram.

Hubungan yang terjalin antara Cirebon dengan Mataram berlangsung damai, bahkan cenderung mesra. Sejak pernikahan Sultan Agung dengan kakak dari Panembahan Ratu I, Ratu Ayu Sakih, sekitar awal tahun 1600-an, hubungan antara Cirebon dan Mataram semakin erat.<sup>48</sup> Hubungan kekerabatan juga terjalin ke Sumedang, dimana ibu

<sup>47</sup> H.J de Graaf dan TH Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa, Tinjauan Sejarah Politik Abad XV-XVI*, terj. -, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm. 184-185.

<sup>48</sup> Adeng, Dkk., *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, hlm. 35.



Pangeran Rangga Gempol I, adalah salah seorang anggota keluarga Mataram yang merupakan saudari dari Panembahan Senopati.<sup>49</sup>

Pada masa Sultan Agung, putri dari Cirebon yang disebut Ratu Kulon, sebenarnya lebih tinggi derajatnya daripada istri Sultan Agung yang lain, yaitu Ratu Wetan, anak bupati Batang. Menurut de Graaf, bahwa Ratu Wetan dan Ratu Kulon adalah orang yang sama. Menurutnya, penyebutan putri dari daerah Batang adalah wilayah tanah *lungguhnya* sebagai ratu Mataram. Ratu ini melahirkan putra yang mewarisi tahta Mataram, yaitu; Sunan Amangkurat I.<sup>50</sup> Sementara menurut G. Moedjanto, istri dari Ratu Wetanlah yang melahirkan anak pewaris tahta Mataram. Pewaris tahta Mataram dari Ratu Kulon, yaitu Pangeran Syahwawrat, dianggap tidak layak karena dianggap sakit dan kurang akal.<sup>51</sup>

Relasi Cirebon dengan Mataram dengan ikatan kekerabatan juga terus dilakukan dengan pernikahan antara Panembahan Ratu II dengan putri dari Sunan Amangkurat I. Pernikahan tersebut membentuk suatu aliansi antara Cirebon dengan Mataram, bahkan menjadi puncak relasi. Anak dari pernikahan antara Panembahan Ratu II dengan putri Sunan

---

<sup>49</sup> Pangeran Rangga Gempol I adalah anak tiri dari Prabu Geusan Ulun. Ibu Pangeran tersebut bernama Ratu Harisbaya yang berasal dari Mataram. A. Sobana Hardjasaputra, "Bupati di Priangan, Kedudukan dan Peranannya Pada Abad Ke-17-Abad Ke-19" dalam, A. Sobana Hardjasaputra (ed.), *Bupati Di Priangan dan Kajian Lainnya Mengenai Budaya Sunda*, (Bandung: Yayasan Pusat Studi Sunda, 2004), hlm. 21.

<sup>50</sup> H.J de Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, terj. Pustaka Utama Grafiti dan KITLV, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 254.

<sup>51</sup> G. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa, Penerapannya Oleh Raja-raja Mataram*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), hlm. 101.

Amangkurat I, menjadi pewaris tahta Cirebon, yaitu Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Wangsakerta.<sup>52</sup>

Ketika Sunan Pakubuwono I<sup>53</sup> naik tahta pada tahun 1705, Cirebon tidak lagi dipertahankan secara *de jure* (hukum). Walaupun Sunan Pakubuwono I, jika mengacu pada pendapat de Graaf, adalah juga memiliki ikatan keluarga dengan Cirebon dari garis nenek. Cirebon dilepas dari protektorat Mataram, meskipun setelah tahun 1680, Cirebon secara *de facto* sudah berada di bawah protektorat VOC. Walaupun masih diakui masih menjadi wilayah Mataram, dengan sistem *gaduhan*, atas bantuan VOC terhadap Mataram dalam pemberontakan Trunojoyo pada tahun 1677.<sup>54</sup>

Politik perkawinan dengan hubungan kekerabatan, tidak menjamin langgengnya relasi politik antara keduanya. Adakalanya malah menyulitkan salah satu pihak, karena di sisi lain, Cirebon adalah sebuah kesultanan yang sejajar dengan Mataram, di sisi lain, Mataram menganggap Cirebon adalah *vassal* atau protektoratnya. Hubungan kekeluargaan antara kesultanan Cirebon dan Banten, juga menyulitkan Mataram, alih-alih keluarga Cirebon membantu Mataram dalam perang melawan pemberontak Trunojoyo, saat Sunan Amangkurat I berkuasa.

---

<sup>52</sup> Adeng, Dkk., *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, hlm. 51.

<sup>53</sup> Sunan Pakubuwono I sebelum naik tahta, bernama Pangeran Puger, yang merupakan anak kedua dari Sunan Amangkurat I, dan adik dari Sunan Amangkurat II.

<sup>54</sup> F. De Haan (ed.), *Daghregister Gehoeden in Casteel Batavia, Vant Passerande Daer Als Over Geheel In Nederland-India, Anno 1680*, (Batavia dan s'Hage: Landsdukkerij dan M. Nijhoff, 1912), hlm. 264.

Ikatan kekerabatan antara Cirebon dengan Banten, malah menjadi obyek pengganggu dari hubungan politik Cirebon dan Mataram.

## 2. Tradisi MagangTahun 1625 - 1677

Tradisi magang yang dijalankan oleh Mataram terhadap putra dari penguasa daerah di istana Mataram, menyiratkan bahwa Mataram ingin menjalankan politik jaminan kesetiaan dari para penguasa daerahnya. Selain sebagai tempat pendidikan bagi calon kepala daerah, tradisi magang di istana Mataram dianggap seperti ruang tahanan.

Tradisi magang ini adalah upaya Mataram mendidik calon penguasa daerah, untuk dapat memimpin daerahnya kelak, dengan kesetiaan dan pengabdian kepada raja Mataram selaku atasannya. Putra-putra penguasa daerah, khususnya Cirebon, selalu berada di istana Mataram, baik di Kerto maupun di Plered.

Tradisi magang para pangeran Cirebon di Mataram telah disediakan sebaik-baiknya oleh penguasa Mataram dan tempatnya di sekitar kraton, dekat dengan raja. Oleh raja Mataram diberikan tempat khusus untuk tinggal di sekitar istana. Penyebutan tempat tinggal para putra penguasa daerah yang tinggal di sekitar istana, biasanya disebut sesuai dengan asal daerahnya, bila ada yang berasal dari Sampang Madura, dengan penyebutan *Sampang*, jika datang dari Surabaya, disebut *Kasurbayan* dan dari Cirebon disebut *Kacirebonan*.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Inajati Adrisijanti, *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*, (Yogyakarta: Jendela, 2000), hlm. 35.

Masing-masing mewakili kekuatan politis tertentu yang melindungi raja. Sayangnya, tradisi magang di istana Mataram, banyak yang berakhir dengan sikap ketidaksetiaan para calon penguasa daerah, dengan didasari oleh rasa takut, bukan didasari oleh sikap pengabdian. Contohnya adalah tradisi magang yang dijalankan oleh Raden Trunojoyo dari Madura.<sup>56</sup>

Selama berlangsungnya relasi antara Cirebon dan Mataram, yang ikut dalam tradisi magang yaitu; Panembahan (Pangeran) Girilaya atau Panembahan Ratu II dan anak-anaknya, yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kertawijaya. Setelah kraton Mataram pindah ke Kartasura pada tahun 1680, sudah tidak ada lagi tradisi magang di istana Mataram dari Cirebon, karena Cirebon sudah menjadi daerah *gadaian* (gadaian) Mataram kepada VOC. VOC juga melarang para penguasa daerah setempat yang telah dikuasai oleh VOC datang ke istana Mataram, sampai Mataram lunas membayar semua hutangnya dalam biaya perang melawan pemberontak. Adapun daerah yang telah diserahkan Mataram kepada VOC di tahun 1677 hingga tahun 1680, adalah Karawang, Ukur, sepanjang bagian barat sungai Cimanuk di Pamanukan dan Cirebon hingga batas sungai Cilosari.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 171-173.

<sup>57</sup> M. J. A. Van der Chijs (ed.), *Dagregister Gehoeden in Casteel Batavia, Vant Passerande Daer Als Over Geheel In Nederland-India, Anno 1677*, (Batavia dan s'Hage: Landsdukkerij dan M. Nijhoff, 1904), hlm. 365-371.

## B. Kebijakan Mataram Terhadap Cirebon

Relasi yang terbentuk antara Cirebon dan Mataram dengan ikatan keluarga, ikut mempengaruhi relasi tersebut. Dasar pemikiran antara penguasa atas dan penguasa bawah, membuat perbedaan mencolok dalam relasi tersebut. Setidaknya selama terjadi relasi antara Cirebon dan Mataram, ada dua buah bentuk yang dapat dilihat dari relasi tersebut, yaitu: penerapan struktur dan asosiasi simbol.

Penerapan struktur berupa hubungan birokrasi antara rakyat dengan penguasa setempat, bukan dari protektor (Mataram) kepada vassal (Cirebon), dalam pengertian bahwa di Cirebon tidak diterapkan struktur birokrasi layaknya penerapan birokrasi Mataram ke daerah lainnya. Vassal (Cirebon) hanya mengikuti apa yang protektor (Mataram) lakukan kepada daerah bawahannya yang lain. Sedangkan mengenai asosiasi simbol, dapat dikatakan bahwa terjadinya hubungan, dapat dilihat melalui simbol-simbol yang muncul.

### 1. Penerapan Struktur

Struktur birokrasi Mataram berlapis-lapis, hingga tingkat terbawah. Struktur teratas terdapat raja Mataram dan keluarganya, lalu patih atau tumenggung sebagai panglima tentara. Di bawahnya struktur tersebut terdapat adipati, lalu wedana dan terakhir demang.

Mataram mempunyai struktur birokrasi yang banyak dan panjang, Cirebon menjadi salah satu bagian dari struktur tersebut. Struktur Mataram dibagi dalam enam bagian, yaitu: *kutharaja*, ibukota, tempat



kraton sebagai pusat pemerintahan berdiri. *Nagaragung*, suatu wilayah yang masih dalam jangkauan pengawasan raja, tetapi pengaturan wilayahnya diatur oleh patih dengan bantuan bupati. *Mancanegara*, berada di luar daerah *negaragung*, baik di bagian barat maupun di bagian timur, tetapi wilayahnya berada di pedalaman. Wilayah ini diatur di bawah pengawasan bupati.

*Pesisir*, adalah struktur kewilayahan Mataram. Cirebon berada di dalamnya. Meskipun penguasa Cirebon tidak disebut sebagai seorang bupati, tetapi Panembahan dan Pangeran, wilayah Cirebon menjadi bagian dari struktur birokrasi *Pesisir* di bawah pengawasan bupati Tegal. Wilayah terakhir adalah *bang* dan *tanah sabrang*. Wilayah *bang* adalah wilayah perbatasan, di bagian barat dengan Banten dan VOC, serta di bagian bagian timur dengan Gelgel Bali. Wilayah *tanah Sabrang* adalah wilayah di luar pulau Jawa seperti Palembang, Jambi dan Sukadana.<sup>58</sup>

Secara struktural jabatan birokrasi hingga tingkat rakyat, hampir sama seperti yang diterapkan oleh Mataram di daerah lainnya. Hanya saja derajat Cirebon di mata penguasa Mataram, yang membuat Cirebon bukanlah seperti daerah bawahan, tetapi sebagai daerah protektorat, sehingga tata cara penerapan birokrasinya sangat berbeda.

Para penguasa Cirebon tidak pernah menghaturkan upeti, walau wilayahnya berada dalam struktur kewilayahan yang terluar dari

---

<sup>58</sup> Mubtadila, *Intervensi VOC dalam Suksesi di Istana Mataram, 1677-1757*, (Yogyakarta: Skripsi S 1, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, Tidak Diterbitkan), hlm. 27.

Mataram. Tidak pernahnya Cirebon menghaturkan upeti, karena Cirebon berada dalam lingkungan keluarga inti Mataram. Istri Sultan Agung dan ibu Sunan Amangkurat I serta ketiga pangeran dari Cirebon, adalah keluarga besar Mataram, sehingga tidaklah mungkin menghaturkan upeti, karena memang bukan orang bawahan.<sup>59</sup>

## 2. Asosiasi Simbol

Asosiasi simbolis adalah adanya ikatan simbolik yang terdapat dalam relasi antara Cirebon dan Mataram. Di antara asosiasi simbolis selama terjadinya relasi, yaitu adanya tatanan, baik berupa bahasa, etika maupun asosiasi simbolis berupa hasil karya kebendaan.

Pelapisan sosial juga berkaitan erat dengan dekatnya kehidupan para pejabat bawahan di pusat kekuasaan. Hubungannya ditentukan oleh adat yang berlaku, lalu diwujudkan dengan sikap hormat dari lapisan terbawah. Hal tersebut terlihat dalam penggunaan struktur dalam bahasa Jawa, *ngoko*, *krama madya* dan *krama inggil*. Titel dalam lingkaran istana, juga memperlihatkan struktur sosial di dalamnya.<sup>60</sup> Setidaknya ada dua asosiasi simbolis yang melekat erat selama masa relasi, antara Cirebon dengan Mataram, yaitu; di bidang Religius dan di bidang Kesenian.

---

<sup>59</sup> Sumber lain menyatakan Cirebon menghaturkan upeti, walaupun masih dalam lingkup keluarga inti Mataram. Adeng, Dkk., *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, hlm. 59. Penulis berpendapat lain, sebab tidak ada bukti lain yang penulis temukan bahwa Cirebon pernah menghaturkan upeti ke Mataram. De Graaf bahkan menyatakan, kehadiran perutusan VOC diterima dengan muka masam oleh Sultan Agung, karena mendahului datangnya Panembahan Ratu I saat di Kerto.

<sup>60</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 58-61.

#### a. Bidang Religius

Adanya ikatan perkawinan dan politik, memunculkan sikap saling menghargai dan adanya upaya peniruan dari salah satu pihak ke pihak lain, dengan maksud-maksud tertentu. Mataram dalam beberapa hal, meniru gaya Cirebon untuk mengangkat dan menjaga kewibawaannya, salah satunya adalah tata kota dan peniruan pembangunan makam dari Sunan Gunung Jati.

Seandainya Cirebon tidak lebih dulu ada dari Mataram, tidak mungkin para penguasa Cirebon berani meniru gaya dari Mataram. Justru pada tataran inilah Cirebon mempengaruhi Mataram dan Mataram kemudian menyebarkannya, hingga kelak Cirebon lepas dari tangan Mataram.<sup>61</sup>

Pada bidang tasawwuf, dimana Sultan Agung adalah pemimpin tarekat Syadzaliyyah, yaitu tarekat yang pengikutnya kebanyakan adalah kaum petani dan pengusaha. Sultan Agung sendiri selalu menganggap Panembahan Ratu I adalah gurunya.<sup>62</sup> Seperti telah disinggung di bab sebelumnya, benda-benda pusaka milik kraton Cirebon juga hampir selalu mencerminkan tradisi Islam yang bernuansakan sufistik.

Ketika pemimpin Giri menolak mengakui Sultan Agung dan Mataram sebagai penguasa tertinggi, kesultanan wali Giri dihancurkan

---

de Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, hlm.181.

<sup>62</sup> Hasan Muarif Ambary, *Tinjauan Akeologis dan Historis Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2012), hlm. 118.

dan dihapus sama sekali pada tahun 1638. Berlainan hasilnya dengan yang diterima oleh Cirebon melalui Panembahan Ratu I dan II, walaupun agak sedikit enggan dalam menerima Mataram sebagai protektornya, Cirebon tetap aman dan lebih dihargai ketimbang sebelumnya.<sup>63</sup>

Pembangunan makam keluarga Mataram oleh Sultan Agung di bukit Imagiri, rupanya juga ikut terpengaruh oleh makam keluarga Cirebon di Gunung Jati.<sup>64</sup> Memang selama masa relasi antara Cirebon dengan Mataram, para raja Cirebon selalu berada dalam lingkaran istana Mataram. Sehingga samapai saat wafatnyaapun, para penguasa Cirebon dimakamkan di dekan kraton Mataram di Plered. Makam Panembahan Ratu I, berada di dekat makam Sultan Agung. Sedangkan makam Panembahan Ratu II, berada di bukit Girilaya, sebelah utara dari kompleks pemakaman Imagiri.<sup>65</sup>

Sepeninggal Sultan Agung, raja penggantinya Sunan Amangkurat I tidak lagi berafiliasi dalam bidang religius, bahkan berlaku sangat kejam terhadap kaum ulama.<sup>66</sup> Sehingga dapat dinyatakan relasi di bidang ini menjadi berlaku surut. Para raja penggantinya juga berlaku sama, bahkan menjadi tidak berhasrat untuk

---

<sup>63</sup> Denys Lombard, *Nusa Jawa, Silang Budaya Jilid III, Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*, terj. Winarsih Partaningrat Arifin, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 158. Lihat juga, de Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, hlm. 41-42.

<sup>64</sup> Ambary, *Tinjauan Akeologis dan Historis Kebudayaan Indonesia*, hlm. 100.

<sup>65</sup> Adeng, Dkk., *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, hlm. 59.

<sup>66</sup> Ahmad Adaby Darban, "Perlawanan Kyai Kajoran Melawan Amangkurat I" dalam *Berkala Kajian dan Pengembangan Pesantren, Islam dan Konvergensi Sosial*, edisi: No. 3/VOL.III/1986, hlm. 60-63.

meneruskan relasi di bidang ini dengan Cirebon. Mungkin hal tersebut disebabkan karena masalah pemberontakan yang selalu terjadi, yang menguras tenaga dan pikiran para raja pengganti Sunan Amangkurat I.

Pada masa Sunan Pakubuwono I, relasi religius akhirnya terputus sama sekali antara Cirebon dan Mataram. Sunan Pakubuwono I mengganti kedudukan religius Cirebon dan beralih kepada keluarga Demak keturunan Sunan Kalijaga, yaitu Panembahan Kadilangu.<sup>67</sup> Hal ini dapat terjadi karena sangat dimungkinkan sikap Sunan Pakubuwono I itu muncul, disebabkan oleh masalah politik antara Cirebon-Mataram-Banten dan VOC selama masa peralihan di tahun 1680-1705.

Sunan Pakubuwono I menganggap wibawa religius Cirebon sudah tidak dapat lagi mengangkat wibawa religius tahta Mataram. Pada sebuah pernyataan Sunan Pakubuwono I, saat mengetahui bahwa seluruh pusaka kraton Mataram hilang akibat dibawa pergi oleh Sunan Amangkurat III, berujar; “selama masih ada Masjid Demak dan makam Kadilangu, maka biarlah itu menjadi pusaka tanah Jawa”.<sup>68</sup> Pernyataan itu menyiratkan bahwa, keagungan wibawa religius keturunan Cirebon, telah digantikan oleh wibawa religius keturunan Kadilangu.

---

<sup>67</sup>Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Pada Masa Lampau, Studi Tentang Mataram II Abad XVI-XIX*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 38.

<sup>68</sup>Nancy K. Florida, *Menyurat Yang Silam Mengkurat Yang Menjelang, Sejarah Sebagai Nurbuwat di Jawa Pada Masa Kolonial*, terj. Revianto Budi S., dan Nancy K. Florida, (Yogyakarta: Bentang, 2002), hlm. 101.



## b. Bidang Kesenian dan Pendidikan

Pendidikan yang disediakan di Mataram untuk para pangeran dalam tradisi magang, rupanya Cirebon menjadi salah satu pihak yang ikut menghiasi pendidikan kebudayaan Jawa, di samping yang datang dari Pangeran Pekik, penguasa Surabaya. Etika, tata krama dan pelajaran-pelajaran tertentu yang diperoleh calon penguasa daerah di istana Mataram, adalah upaya penerapan asosiasi simbolis, dari pusat ke daerah.

Kesenian musik dan wayang yang ada di Cirebon, umumnya terpengaruh dari Mataram, meskipun Cirebon sendiri sudah mempunyainya jauh sebelum Mataram ada. Kesenian pertunjukan tersebut, sama-sama berasal dari Sunan Kalijaga, karena Sunan Kalijaga pernah berjumpa dengan penguasa Cirebon dan Mataram awal.<sup>69</sup> Kesamaan guru sosio-spiritual itulah, yang membuat jalinan religius antara Mataram dan Cirebon menjadi erat.

Di bidang tata kota, Cirebon dan bekas ibukota Kerto dan Plered, mempunyai kemiripan yang sama. Terdapatnya beberapa struktur dasar dari ciri-ciri kota kesultanan, yaitu, alun-alun, kraton, pasar dan masjid agung.<sup>70</sup> Hal ini melambangkan kedekatan hubungan antara, Cirebon dan Mataram. Setiap tata kota di kawasan Pesisir, pendopo

---

<sup>69</sup> Zainul Milal Bizawie, *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia 1945-1949*, (Jakarta: Pustaka Kompas, 2014), hlm 105

<sup>70</sup> Hasan Muarif Ambary, "Pengamatan Beberapa Konsepsi Estetika dan Simbolis Pada Bangunan Sakral dan Sekuler Masa Islam di Indonesia", dalam, Edi Sedyawati (ed.), *Diskusi Ilmiah Arkeologi II, Estetika Dalam Arkeologi Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1987), hlm. 110.

Kabupaten selalu menghadap ke selatan, sedangkan di Cirebon, Kabupaten menghadap ke utara, karena pendopo Kabupaten ini bukanlah pendopo Kabupaten bawahan, tetapi statusnya adalah kraton bagi Panembahan Ratu Cirebon.<sup>71</sup>

Ketinggian derajat dan pendidikan spiritual yang tinggi yang dianut oleh para penguasa Pesisir sebelum Mataram, adalah hasil dari pendidikan religius sejak zaman Wali Songo (Sunan Ampel untuk penguasa Surabaya dan Sunan Gunung Jati untuk penguasa Cirebon), hal itulah yang tidak dimiliki oleh Mataram yang merupakan negeri baru dari pedalaman. Mataram di zaman itu belum memiliki seperangkat penunjang kebudayaan Jawa yang luhur, untuk mengasosiasikan simboliknya ke penjuru daerah yang ditaklukkan oleh Mataram. Oleh karena itu dalam banyak hal, Mataram akhirnya meniru gaya dan sistem pendidikan dari Pesisir, untuk dikembalikan lagi arti simbolisnya ke seluruh daerah kekuasaan Mataram, termasuk Cirebon. Seandainya Cirebon tidak lebih dulu ada dari Mataram, tentu tidak mungkin Cirebon berani meniru gaya yang ada di kotaraja atau sesuatu karya yang dibuat raja Mataram sendiri.

Kraton Mataram selalu mencoba untuk membawa (menyebarkan) sejauh-jauhnya kebudayaan yang dihasilkan, untuk kemudian ditiru

---

<sup>71</sup> Adrisijanti, *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*, hlm. 212.

oleh para bawahannya. Inilah yang dimaksud dengan upaya pengasosiasian simbolik, dalam relasi antara Cirebon dan Mataram.<sup>72</sup>

Kehancuran asosiasi simbolis terjadi bukan karena kemandegan pendidikan, tetapi lebih disebabkan karena kehancuran hubungan antara vasal dan pusat politik negara protektoratnya, yaitu antara Cirebon dan Mataram. Pola penguasaan yang tiran dari Sunan Amangkurat I, juga ikut melemahkan aspek timbal balik asosiasi simbolik, dari dua pusat kebudayaan Jawa, yaitu antara Pesisir dan pedalaman, hingga dapat dikatakan, pedalaman menjadi sangat hegemonik terhadap kebudayaan Pesisir dan kemudian menjadi tergantung dari pusat di pedalaman. Ketergantungan secara politik dan ekonomi yang dilakukan oleh penguasa Mataram, menyebabkan daerah-daerah menjadi kesulitan membayar pajak ke pusat dan kemudian dapat dengan mudah ikut tersulut jika ada sedikit api pemberontakan.<sup>73</sup>

Universitas Islam Negeri  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

---

<sup>72</sup> Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi dan Kawulo*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 31

<sup>73</sup> Peter Carey, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa, Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1830*, terj. Tim Komunitas Bambu, (Depok, Komunitas Bambu, 2008), hlm. 52.

## BAB IV

### PASANG SURUT HUBUNGAN CIREBON-MATARAM

#### A. Cirebon Sebagai Mediator Relasi Politik di Pulau Jawa

Pengabdian Cirebon terhadap protektornya, Mataram, adalah mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan Mataram, yang terutama adalah kebutuhan politik, dengan menjadi penengah atau mediator, dalam konflik yang terjadi antara VOC, Banten dan Mataram selama terjadinya relasi.

##### 1. Mediasi dengan VOC

Saat Mataram telah memulai politik ekspansinya selama masa Sultan Agung, Cirebon bertindak sebagai mediator dalam relasinya dengan VOC. Pada saat utusan VOC pada tahun 1622 datang mendahului kedatangan Panembahan Ratu I dari Cirebon, Sultan Agung dengan wajah yang masam, baru mau menerima utusan VOC di kratonnya setelah Panembahan Ratu I kemudian datang. Mataram memang memandang tinggi para penguasa Cirebon selama masa Sultan Agung (1613-1645). Ketika Giri dihancurkan Mataram pada tahun 1638, Cirebon telah benar-benar sangat tinggi derajatnya, terutama untuk mengangkat wibawa Mataram di bidang religius.<sup>74</sup>

Pada saat Mataram melakukan serangan pertama ke Batavia pada tahun 1628, timbul desas-desus bahwa Cirebon telah membocorkan kedatangan pasukan Mataram kepada VOC dan pada saat serangan kedua

---

<sup>74</sup> H.J de Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, terj. Pustaka Utama Grafiti dan KITLV, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 185.

di tahun 1629, VOC yang telah mengetahui rencana serangan kedua Mataram, membakar lumbung-lumbung beras yang telah disiapkan Mataram di sepanjang jalan antara Tegal, Cirebon dan Pamanukan. Semua serangan Mataram ke bagian barat menjadi gagal.<sup>75</sup>

Setelah mengetahui kegagalan dan dampak yang ditimbulkan sangat serius, yaitu pemberontakan dan pengendalian pemberontakan yang kejam dari Mataram, Cirebon lalu meminta VOC (dengan surat rahasia), agar kapal-kapal VOC yang lewat di perairan Cirebon, agar menembaki kota Cirebon, tentunya dengan peluru kosong pada tahun 1630.

Upaya Cirebon tersebut didasari oleh sebuah perasaan takut, kalau-kalau Mataram mengetahui bahwa Cirebon punya andil di balik kegagalan Mataram menyerang Batavia. Kesan yang ditimbulkan dari peristiwa “penembakan meriam dari kapal VOC dengan peluru yang kosong”, adalah Cirebon masih di bawah perlindungan Mataram dan VOC juga memusuhi Cirebon.<sup>76</sup>

Melalui Cirebon pula, Sultan Agung mengirim banyak penduduk dan logistiknya (sekitar 6.000 orang) untuk membangun kota Karawang di tahun 1632. Di bawah pimpinan Tumenggung Martasari dan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 292. Lihat juga Adeng, Dkk., *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, hlm. 37.



Singaperbangsa, Mataram berusaha membangun benteng di *bang kulon*, guna menghadapi kembali VOC kelak di kemudian hari.<sup>77</sup>

Selama masa Sunan Amangkurat I (1645-1677) bertahta di Mataram, Cirebon praktis menjadi lebih terbuka kepada VOC. Terbukanya penguasa Mataram kepada VOC, membuat Cirebon dapat terus menjalin hubungan yang lebih erat dengan VOC dan memainkan politik penyeimbang antara Mataram dan VOC. Hingga kejatuhan Sunan Amangkurat I di tahun 1677, membuat posisi Cirebon menjadi semakin bebas menjalankan politiknya. Pada perjanjian yang dibuat antara VOC dan Mataram pada tahun 1677, Cirebon secara *de facto* telah berada di bawah protektorat VOC, meskipun secara *de jure* masih menjadi bagian dari Mataram.<sup>78</sup>

Relasi Cirebon dengan VOC terbentuk atas dasar perniagaan semata. Belum ada niatan VOC untuk mengambil Cirebon seluruhnya dari Mataram. Pada kesempatan ini, para Sultan Cirebon sebenarnya

---

<sup>77</sup> M. Sanggupri Boechari dan Wiwi Kuswiah, *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 43-44.

<sup>78</sup> Pada perjanjian antara VOC dan Mataram di tahun 1677, batas kekuasaan VOC adalah dari Batavia hingga perbatasan barat sungai Cipunegara dan sungai Cimanuk. Sebelah timurnya masih diakui milik Mataram. VOC kemudian membujuk para penguasa Cirebon, agar berlindung di bawah payung militer VOC, yang langsung saja disetujui oleh para penguasa Cirebon. M. J. A. Van der Chijs (ed.), *Daghregister Gehoeden in Casteel Batavia, Vant Passerende Daer Als Over Geheel In Nederland-India, Anno 1677*, (Batavia dan s'Hage: Landsdukkerij dan M. Nijhoff, 1904), hlm. 365-371.

sudah berniat mengabdikan diri di bawah perlindungan VOC. Oleh VOC didirikan benteng *berschemeer* yang berarti “perlindungan”.<sup>79</sup>

Sampai dengan masa kekuasaan raja-raja Mataram setelah Sunan Amangkurat II, tidak ada tekanan berarti terhadap VOC. Para penguasa Mataram cenderung berlindung di bawah payung militer dan ekonomi VOC, dalam menstabilkan politik dalam negeri, termasuk masalah Cirebon. VOC cenderung lebih memilih menjauhkan Cirebon dari cengkeraman Mataram, agar kekuatan militer dan politik di Jawa terbagi. Apalagi setelah Banten jatuh ke tangan VOC sejak tahun 1684. Praktis fungsi Cirebon sebagai mediator antara Mataram dan VOC menjadi surut, bahkan menjadi hilang sama-sekali, terutama setelah Cirebon benar-benar dilepaskan dari kekuasaan Mataram di tahun 1705.

Sunan Pakubuwono I sudah melihat bahwa dapat terjalin hubungan langsung antara Mataram dengan VOC, tanpa bantuan Cirebon lagi. VOC sudah dapat dihubungi langsung di Semarang, karena kedudukannya sebagai propinsial VOC sejak tahun 1692.<sup>80</sup>

## 2. Mediasi dengan Banten

Upaya Mataram dalam menguasai pulau Jawa, dihalangi oleh Banten dan VOC. Melalui Panembahan Ratu I, Mataram mendesak agar

---

<sup>79</sup> de Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, hlm. 293. Lihat juga Novida Abbas, *Bekas Benteng-benteng Kolonial di Jawa: Penggunaan dan “Penyalahgunaannya”*, dalam *Berkala Arkeologi*, Edisi No. 1 tahun XXI/ Mei 2002.

<sup>80</sup> Semarang menjadi daerah *gaduhan* (gadaian), atas bantuan VOC terhadap tahta Mataram. Daerah Semarang dikenal sebagai *Oosthoek* dengan status wilayah Gubernur Timur Laut Jawa. W.G.J. Remmelink, *Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa, 1725-1743*, terj. Akhmad Santoso, (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 16.

Banten mengakui Mataram sebagai penguasa tertinggi di pulau Jawa pada tahun 1633. Upaya menuntut pengakuan Banten terhadap Mataram, diulangi lagi pada tahun 1637. Namun semua upaya tersebut sia-sia dan tidak ada tindakan militer apapun dari Sultan Agung, karena memang Banten jaraknya begitu jauh. Banten juga tidak ingin Batavia jatuh ke tangan Mataram, begitu juga VOC, yang tidak ingin Banten jatuh ke tangan Mataram.<sup>81</sup>

Dahulu Mataram pernah menyerang langsung ke jantung kota Banten, pada masa Panembahan Senopati di tahun 1597 dengan kekuatan 15.000 pasukan, namun hasilnya sangat sedikit. Bahkan ketika Sultan Banten telah wafat dalam penyerangan ke Palembang di tahun itu juga, Banten tetap tidak dapat jatuh ke tangan Mataram.<sup>82</sup>

Sebelum semua kegagalan serangan Mataram ke Batavia pada tahun 1628-1629, VOC memang pernah menawarkan bantuan kepada Mataram, untuk bersama-sama menyerang Banten. Hal itu ditolak oleh Mataram, karena beranggapan, keadaan ini bisa diatasi sendiri, baik oleh Sultan Agung maupun melalui mediasi oleh Panembahan Ratu I.<sup>83</sup> Informasi yang terdapat dalam *Babad Sultan Agung*, bahwa Sultan Cirebon, Panembahan Ratu I, ikut terlibat dalam kegiatan mediasi antara

---

<sup>81</sup> Sultan Agung pernah menyatakan di tahun 1622 bahwa, pendirian benteng Batavia menjadi sebuah duri di kakinya. Agar sakitnya hilang, maka duri itu harus dicabut, yaitu dengan menyerang Batavia. Revianto Budi Santosa, (ed.), *Dari Kabanaran Menuju Yogyakarta, Sejarah Hari Jadi Yogyakarta*, (Yogyakarta: Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta, 2008), hlm 12.

<sup>82</sup> Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 162.

<sup>83</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 165.

Mataram dengan Banten, meskipun dengan kesan dan tekanan frekuensi yang kecil.<sup>84</sup>

Setelah kegagalan-kegagalan diplomasi dan militer yang panjang selama tahun 1630-an. Penguasa Mataram meminta melalui Panembahan Ratu I mulai menekan Banten, agar mengakui Mataram sebagai penguasa tertinggi di pulau Jawa. Hingga wafatnya Panembahan Ratu I di tahun 1649, Banten tetap tidak mau mengakui hal tersebut.

Naik tahtanya Panembahan Ratu II menjadi penguasa Cirebon di tahun 1650, memaksa Cirebon untuk mewujudkan rasa setianya pada Sunan Amangkurat I, dengan lebih dahulu menyerang Banten. Cirebon mendahului menyerang Banten di Pontang dengan kekuatan 2.000 hingga 3.000 pasukan yang diangkut dengan 60 kapal, tanpa dukungan pihak Mataram. Pasukan Cirebon dipimpin oleh Pangeran Martasari dan Ngabehi Panjang Jiwa, berhadapan dengan pasukan Banten di bawah pimpinan Lurah Astrasusila. Upaya penyerangan tersebut berakhir dengan mengerikan dan menyedihkan, karena hampir semua pasukan Cirebon tewas dalam pertempuran.<sup>85</sup>

Kekalahan Cirebon dalam peristiwa Pagerage, adalah kekalahan dari Mataram juga, sebab dengan kekalahan tersebut para pengacau dari Banten, mulai merasuk ke wilayah *bang kulon* Mataram di sekitar

---

<sup>84</sup> *Babad Sultan Agung*, Alih Aksara: Balai Penelitian Bahasa Di Yogyakarta, Alih Bahasa: Soenarko H. Poespito, (Yogyakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980), hlm. 160.

<sup>85</sup> Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*, hlm. 167-168.

Pakuan dan Karawang di tahun 1657. Upaya damai tidak dapat lagi diusahakan, karena masing-masing pihak sama-sama kukuh pendiriannya. Bataviapun tidak luput dari ancaman perusuh tersebut di bagian selatan.<sup>86</sup>

## **B. Surutnya Hubungan Cirebon-Mataram.**

Surutnya relasi antara Cirebon-Mataram, tidak lepas dari adanya berbagai gangguan dan sikap, yang mempengaruhi hubungan itu sendiri. Setidaknya selama terjadinya relasi antara Cirebon dan Mataram, ada tiga hal pokok, yang mempengaruhi relasi tersebut, yaitu; adanya perebutan tahta, antara Pangeran Shahwawrat yang berasal dari ibu Ratu Cirebon, dengan Pangeran Sayidin (kelak menjadi Sunan Amangkurat I) dari ibu Ratu Batang. Kedua, di akhir pemerintahan Sunan Amangkurat I, gangguan Banten dengan dukungannya terhadap pemberontak Raden Trunojoyo melawan Sunan Amangkurat I. Terakhir adalah munculnya sikap pasif Cirebon terhadap keadaan yang terjadi di Mataram.

Adapun penjelasannya yaitu:

### **1. Perebutan Tahta di Istana Mataram**

Politik perkawinan yang dijalankan oleh Mataram selama pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) dan diikuti oleh penerusnya, Sunan Amangkurat I (1645-1677), semakin membuat relasi Cirebon dan Mataram menjadi semakin erat di bawah tekanan hubungan darah. Pihak Cirebon memang tidak pernah mengakui hak tersebut kepada

---

<sup>86</sup> Leonard Blusse, *Persekutuan Aneh, Pemukim Cina, Wanita Peranakan dan Belanda di Batavia VOC*, terj.-, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 17.



keturunannya sendiri, karena memang keturunannya telah berada di atas tahta itu, yaitu Sunan Amangkurat I. Tindakan dan perlakuan Sunan Amangkurat I lah, yang membuat Cirebon selalu ingin menjadi dirinya sendiri dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan Mataram.

Sebagaimana telah disinggung di atas, Cirebon sebenarnya berhak atas tahta Mataram, terutama antara Pangeran Shahwawrat dan Pangeran Sayidin.<sup>87</sup> Pangeran Shahwawrat adalah kakak dari Pangeran Sayidin, yang menurut G. Moedjanto berasal dari ibu Ratu Cirebon, sedangkan Pangeran Sayidin berasal dari Ratu Batang, namun menurut H.J de Graaf, berasal dari ibu yang sama. Mungkin pengaruh Cirebon lebih terlihat kepada Pangeran Shahwawrat daripada ke Pangeran Sayidin, karena pengasuhan Tumenggung Mataram terhadap Pangeran Sayidin yang lebih condong ke Mataram.

Masalah tahta itu muncul di saat-saat terakhir kekuasaan Sultan Agung di tahun 1640-an. Di pusat kraton Kerto (kraton Mataram yang didirikan oleh Sultan Agung) terjadi kehebohan, karena Pangeran Sayidin yang diangkat menjadi Putra Mahkota, melakukan tindakan yang dianggap asusila, yaitu dituduh melakukan serong terhadap salah satu selir dari panglima militer Mataram, yaitu Tumenggung Wiraguna. Di balik itu dimungkinkan Tumenggung Wiraguna lebih condong kepada naik tahtanya Pangeran Shahwawrat menjadi raja Mataram, daripada

---

<sup>87</sup> Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa, Penerapannya Oleh Raja-raja Mataram*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), hlm. 26-27.

Pangeran Sayidin. Tumenggung Wiragunan juga mendapat banyak keuntungan ekonomi dan politik dari relasinya dengan Cirebon.<sup>88</sup>

Setelah naik tahtanya Pangeran Sayidin menjadi raja baru Mataram di tahun 1646 dengan gelar Sunan Amangkurat I, maka Cirebon menjadi semakin menjadi bagian dari keluarga inti Mataram, meskipun Pangeran Shahwawrat gagal menjadi raja Mataram pengganti Sultan Agung. Sunan Amangkurat I kemudian menikahkan putrinya dengan Panembahan Ratu II, sehingga anak-anak yang lahir darinya kelak dapat menjadi pewaris dan pelindung tahta Mataram. Adapun anak-anak keturunan Panembahan Ratu II yaitu: Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Wangsakerta.

Upaya untuk menahan Panembahan Ratu II dilakukan oleh Sunan Amangkurat I hingga wafatnya Panembahan Ratu II pada tahun 1667. Hingga kemudian muncul Pemberontakan Trunojoyo yang terjadi di tahun 1670-1677, yang sebenarnya adalah upaya untuk menggulingkan kekuasaan Sunan Amangkurat I yang sudah tua, agar sang anak, yaitu Putra Mahkota dapat segera naik tahta dan menggantikan ayahnya. Rupanya sang anak berada di balik munculnya pemberontakan itu. Sebelum wafatnya, Sunan Amangkurat I berpesan kepada anak-anaknya agar merebut kembali tahta Mataram dan Pangeran Alitlah (Pangeran Puger) yang berhasil mengusir kaum pemberontak, sedangkan kakaknya mengikuti ayahnya lari ke Tegal. Atas dasar keadaan inilah perebutan

---

<sup>88</sup> de Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, hlm. 257-258.

tahta Mataram berlanjut dan keluarga dari Cirebon menjadi tersingkir dari haknya, karena ikut tertangkap oleh pemberontak Trunojoyo yang berhasil menduduki ibukota Plered.

Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Martawijaya kemudian diambil oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari tangan pemberontak Trunojoyo di Kediri ke Banten, lalu Cirebon dibagi menjadi tiga kesultanan. Pangeran Martawijaya didudukkan menjadi Sultan Kasepuhan Cirebon, Pangeran Kartawijaya menjadi Sultan Kanoman Cirebon dan Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan Cirebon pada tahun 1680. Sejak saat itu, tradisi *seba* ke ibukota Mataram yang telah berpindah ke Kartasura sudah tidak lagi dilakukan, karena Cirebon sudah menganggap bukan lagi sebagai daerah bawahan Mataram. Hingga benar-benar dilepasnya Cirebon dari tangan Mataram di tahun 1705, tidak ada lagi tradisi *seba* penguasa Cirebon ke ibukota Mataram.<sup>89</sup>

## 2. Gangguan Banten

Setelah penyerangan Cirebon atas nama Mataram yang gagal di tahun 1650, Banten merasa terus selalu diintai oleh Mataram dan terus merasa terganggu oleh Mataram. Banten yang merupakan bagian dari keluarga besar keturunan Sunan Gunung Jati, merasa ikut prihatin atas keputusan Cirebon mendukung tahta Mataram selama masa pemerintahan Sultan Agung dan Sunan Amangkurat I. Keprihatinan Banten atas keadaan

---

<sup>89</sup>Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Pada Masa Lampau, Studi Tentang Mataram II Abad XVI-XIX*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 114-115.

politik di Cirebon, ikut menyeret Banten dalam konspirasi dan dukungan Banten terhadap segala konflik yang terjadi di Mataram. Sultan Ageng Tirtayasa ikut mensponsori pemberontakan Trunojoyo yang akan menggulingkan Sunan Amangkurat I pada tahun 1670-1677.

Para penguasa Banten sebelum Sultan Ageng Tirtayasa, rupanya sangat takut bila Mataram benar-benar menyerang seperti pada tahun 1597 dan 1650. Sebuah audiensi antara Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir dengan pejabat VOC di tahun 1630-an menyatakan: “jika bangsa anda menyerang kami dari laut, kami bisa lari ke gunung dan bangsa anda tidak akan mungkin mengejar kami ke sana. Sedangkan jika raja Mataram menyerang kami saat ini, tidak ada tempat lari bagi kami, karena mereka akan terus mengejar kemanapun kami pergi”.<sup>90</sup> Mungkin dari ketakutan dan mitos itulah, yang ikut membawa Sultan Ageng Tirtayasa mensponsori gerakan pemberontakan, di samping terdapat anggota keluarganya dari keluarga Cirebon yang menjadi tawanan politik di Mataram (Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya), selama masa kepemimpinan Sunan Amangkurat I.

Saat itu Sultan Ageng Tirtayasa sedang berkonflik dengan VOC dan jatuhnya Makassar ke tangan VOC di tahun 1669 dalam perjanjian Bongaya, telah ikut menjepit Banten di bidang politik. Banten tetap tidak mau berkompromi dengan VOC sebagaimana berkomprominya Sunan

---

<sup>90</sup>Uka Tjandrasasmita, *Sultan Ageng Tirtayasa*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984), hlm.35.

Amangkurat I di Mataram. Banyak pejuang dari Makassar yang ditampung di Banten serta banyak juga yang berkeliaran di Pesisir Mataram seperti Karaeng Galesong dan bergabung dengan pemberontak Trunojoyo.<sup>91</sup>

Konflik yang akhirnya pecah di Mataram, kemudian dimanfaatkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dengan memberikan dukungan material dan spiritual bagi kaum pemberontak Trunojoyo, untuk sekaligus menghancurkan VOC dan menyelamatkan anggota keluarganya dari Cirebon, jauh dari pengaruh Mataram.<sup>92</sup> Pengaruh Banten mulai masuk ke dalam istana Cirebon yang hanya diwakili oleh Pangeran Wangsakerta sejak tahun 1676. Meskipun pemberontakan tersebut berhasil dihancurkan oleh VOC untuk menegakkan kembali tahta Mataram, misi Sultan Ageng Tirtayasa berhasil dengan dapat dikembalikannya anggota keluarga Cirebon dan mendudukkannya menjadi penguasa Cirebon yang semi mandiri. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memainkan politik gangguan terhadap relasi Cirebon-Mataram, tanpa diketahui oleh pihak Mataram dan VOC. Pengaruh Banten di Cirebon kemudian perlahan lenyap, seiring jatuhnya Banten ke tangan VOC sejak tahun 1681.

### **3. Munculnya Sikap Pasif Cirebon Terhadap Konflik di Mataram**

Sikap pasif Cirebon yang muncul terhadap semua konflik yang terjadi di Mataram, dikarenakan dua hal; *pertama*, kedudukan derajat

---

<sup>91</sup>H.J. de Graaf, *Disintegrasi Mataram Di Bawah Mangkurat I*, terj. Pustaka Grafitipers dan KITLV, (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1990), hlm. 213. Lihat juga *Babad Trunojoyo-Suropati*, terj. Balai Pustaka, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 61.

<sup>92</sup> Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*, hlm. 172.



keluarga keturunan Cirebon yang langsung sampai ke trah raja Mataram, sehingga tidak akan mungkin menangani langsung konflik, *kedua*, karena sistem politik Mataram, yang tidak akan membiarkan penguasa daerah (protektoratnya) menjadi mandiri.

Alasan pertama berasal dari H.J de Graaf telah disinggung bahwa ketika terjadi konflik dengan daerah lain di pulau Jawa, baik dalam upaya penaklukan selama masa Sultan Agung, hingga terjadinya berbagai peperangan dan pemberontakan di Mataram, keluarga dari Cirebon tidak pernah diizinkan terlibat, kecuali saat terjadinya peristiwa Pagarage melawan Banten. Bahkan keluarga dari Sumedangpun hanya sesekali diizinkan melakukannya, itupun atas perintah raja Mataram sendiri.<sup>93</sup>

Alasan yang *kedua*, berasal dari Peter Carey yang menyatakan bahwa, para penguasa Mataram tidak akan membiarkan daerah kekuasaannya menjadi mandiri. Meskipun secara umum Cirebon menjadi bagian dari keluarga inti Mataram, secara politik dan ekonomi, Cirebon selalu dianggap oleh Mataram sebagai daerah kekuasaannya, sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengannya, harus melalui persetujuan dan kebijakan raja Mataram. Hal itu terutama terjadi pada masa kekuasaan

Sunan Amangkurat I.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Ikutnya Pangeran Rangga Gempol I dalam penaklukan Mataram ke Sumenep dan Pati, diizinkan atas perkenan Sultan Agung, tetapi tidak dalam penaklukan Surabaya dan serangan ke Batavia. Hal itu dikarenakan derajat keluarga dari Sumedang lebih tinggi dengan derajat keluarga dari wilayah lain di Jawa. de Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, hlm. 146.

<sup>94</sup> Peter Carey, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa, Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1830*, terj. Tim Komunitas Bambu, (Depok, Komunitas Bambu, 2008), hlm. 30.

Berkenaan dengan kedua alasan di atas yang menekan Cirebon, maka tidak heran apabila harapan bantuan dari Cirebon selama masa konflik pemberontakan yang terjadi di Mataram, ditanggapi dingin oleh pihak Cirebon, karena memang penguasa daerahnya tidak dapat berbuat apa-apa, sebab kewenangannya telah dilucuti oleh raja Mataram. Dimungkinkan Sunan Amangkurat I selama akhir kekuasaannya karena pemberontakan Trunojoyo di tahun 1677, ingin lari dan berlindung di Cirebon, sayang dia keburu mangkat dan dimakamkan di Tegal, tanpa sempat berkunjung ke tanah leluhur ibunya. Sikap pasif yang muncul dari Cirebon terhadap keadaan Mataram, erat kaitannya dengan kebijakan penguasa Mataram sendiri, selama dalam jalinan relasi Cirebon-Mataram.

### **C. Lepasnya Cirebon dari Pengaruh Mataram**

Cirebon dilepaskan dari pengaruh Mataram dikarenakan dua hal, *pertama* karena posisi Cirebon yang strategis dan *kedua* karena Cirebon merupakan daerah terkuat milik Mataram yang ada di sebelah barat setelah Karawang jatuh ke tangan VOC sejak tahun 1677. Sebab-sebab utama dipisahkannya Cirebon dari pengaruh Mataram oleh VOC karena Cirebon mempunyai potensi militer dan ekonomi bagi Mataram, sehingga VOC berkeinginan agar Cirebon berada di bawah proteksinya, yang dengan begitu jika muncul konflik yang lebih besar, maka VOC dapat memanfaatkan Cirebon dalam politik adu dombanya.

### 1. Dilepaskannya Cirebon Dari Protektorat Mataram

Setelah kegagalan serangan ke Batavia dan Banten, praktis Mataram hanya mengkonsentrasikan kekuatannya pada daerah Pesisir seperti di Karawang dan Cirebon. Mangkatnya Sultan Agung di tahun 1645 serta naik tahtanya Pangeran Sayidin menjadi Sunan Amangkurat I, mengubah peta politik di Mataram. Kerusuhan sosial dan pemberontakan yang terjadi di Mataram (pemberontakan Trunojoyo dan Untung Surapati), mengubah untuk selamanya peta politik di pulau Jawa. Akhir dari pemberontakan di Mataram, terutama pemberontakan Trunojoyo, menjadi babak yang sangat krusial bagi relasi Cirebon dengan Mataram, di samping Banten dan VOC yang ikut bermain di dalamnya.

Hasil akhir dari pemberontakan Trunojoyo adalah dilepaskannya wilayah-wilayah bagian barat Mataram, untuk diserahkan pada VOC atas bantuan militernya terhadap penegakan tahta Mataram di tahun 1677. Mataram praktis hanya mengandalkan Cirebon sebagai batas kekuasaannya di bagian barat. Bahkan saat Cirebon dijauhkan dari pengaruh Mataram pada tahun 1680 dan mendapat pengaruh VOC, Cirebon berharap dapat menjadi kekuatan politik yang mandiri kembali.

Sayang kebebasan penguasa Cirebon menjadi terbatas dan Cirebon kemudian dibelah menjadi tiga kesultanan kecil, meskipun mendapat perlindungan dari VOC pada tahun 1680.<sup>95</sup> Pada tahun ini juga, Sunan

---

<sup>95</sup> F. De Haan (ed.), *Daghregister Gehoeden in Casteel Batavia, Vant Passerande Daer Als Over Geheel In Nederland-India, Anno 1680*, (Batavia dan s'Hage: Landsdukkerij dan M. Nijhoff, 1912), hlm. 264.

Amangkurat II meminta kepada VOC, agar Cirebon dikembalikan pada Mataram secara *de facto*, agar Cirebon tetap menjalankan kewajibannya seperti biasa. Permintaan itu diterima, tetapi tidak dijalankan VOC, karena VOC telah memberi perlindungan pada Cirebon, kalau-kalau Mataram menyerang Cirebon lewat militer.<sup>96</sup>

Cirebon dibagi antara putra-putra Panembahan Ratu II, yaitu Pangeran Kartawijaya, Pangeran Martawijaya dan Pangeran Wangsakerta. Pangeran Kartawijaya memimpin kraton Kanoman, Pangeran Martawijaya memimpin kraton Kasepuhan dan Pangeran Wangsakerta memimpin Kacirbonan, tetapi dia sendiri tidak punya kraton dan hanya bertindak sebagai patih.<sup>97</sup> Gejolak politik di Cirebon dengan Mataram belum berhenti, munculnya pemberontak Surapati yang melewati Cirebon untuk pergi ke Kartasura menjadi kendalanya. Pemberontakan Untung Surapati melawan VOC yang terjadi antara tahun 1686-1710, semakin menyulitkan posisi Mataram.<sup>98</sup>

Setelah berakhirnya masa pemerintahan Sunan Amangkurat II, terjadi perebutan kekuasaan di Mataram antara Pangeran Puger dengan Sunan Amangkurat Mas (III). Pangeran Puger yang merupakan adik dari Sunan Amangkurat II, menuduh Sunan Amangkurat III bersekongkol melawan VOC dengan bantuan pemberontak Untung Surapati.

---

<sup>96</sup> Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*, hlm. 167.

<sup>97</sup> Adeng, Dkk., *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, hlm. 41.

<sup>98</sup> H.J de Graaf, *Terbunuhnya Kapten Tack, Kemelut Di Kartasura Abad XVII*, terj. Dick Hartoko, (Jakarta: Grafiti Press, 1989), hlm. 119. Lihat juga *Babad Trunojoyo-Suropati*, terj. Balai Pustaka, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 109.

Pangeran Puger akhirnya naik tahta menjadi raja Mataram dengan gelar Sunan Pakubuwono I pada tahun 1703, atas bantuan militer VOC dalam perebutan tahta Mataram melawan Sunan Amangkurat III. Sebagai ganti bantuan militer VOC atas kenaikan tahta, Sunan Pakubuwono I pada tahun 1705, melepaskan sisa daerah barat Mataram berupa tanah Priangan dan Cirebon secara *de jure* kepada VOC. Sejak itu Cirebon bukan lagi menjadi bagian Mataram. Pemberian tersebut didasari oleh balas jasa bantuan VOC, atas naik tahtanya Pangeran Puger. Cirebon kemudian menjadi bagian dari penyerahan wilayah Mataram pada VOC.

Setelah pelepasan hak Mataram atas tanah Priangan dan Cirebon, para bupati Priangan seluruhnya, kemudian berada di bawah yurisdiksi VOC dan berada dalam pengawasan Sultan Cirebon. Para bupati Priangan mengangkat sumpah setia pada VOC di hadapan Sultan Kasepuhan Cirebon pada 5 Oktober 1705.<sup>99</sup>

## **2. Cirebon Di Bawah Protektorat VOC**

Setelah berakhirnya pemberontakan Trunojoyo yang memporak-porandakan keadaan di Mataram, untuk beberapa saat Cirebon kemudian berada di bawah kendali Banten. Pembagian kesultanan Cirebon menjadi

---

<sup>99</sup> Sobana Hardjasaputra, "Bupati di Priangan, Kedudukan dan Peranannya Pada Abad Ke-17-Abad Ke-19" dalam, A. Sobana Hardjasaputra (ed.), *Bupati Di Priangan dan Kajian Lainnya Mengenai Budaya Sunda*, (Bandung: Yayasan Pusat Studi Sunda, 2004), hlm. 31.



tiga, rupanya juga disetujui oleh VOC karena diplomasi politik Sultan Ageng Tirtayasa di tahun 1679.<sup>100</sup>

Saat Banten sedang berada dalam konflik suksesi setahun setelahnya, rupanya VOC menawarkan ke Cirebon sebagai protektoratnya juga. Hal tersebut dimungkinkan oleh VOC karena melihat posisi Cirebon yang berada dalam dua kutub, pertama di kutub Mataram dan kedua di kutub Banten. VOC melihat bahwa jika Cirebon kembali beralih ke Mataram, tentu akan sulit bagi VOC menancapkan pengaruhnya ke Cirebon, begitu pula sebaliknya.

Ketika akhirnya para Sultan Cirebon menerima protektorat VOC, VOC kemudian membangun benteng yang bernama *berschemeer*, yang berarti “perlindungan”. Pembangunan benteng tersebut dimaksudkan agar Cirebon mendapat perlindungan, jika pihak Mataram sampai tidak menerima keadaan tersebut dan melakukan tindakan militer untuk mendudukkan kembali Cirebon secara *de facto*.<sup>101</sup>

Keputusan Cirebon menerima protektorat VOC, dilakukan tanpa persetujuan raja Mataram yang dijabat oleh Sunan Amangkurat II. Hal itu kemudian menimbulkan rasa tidak suka sang raja terhadap keputusan tersebut. Sunan Amangkurat II yang telah dibantu oleh VOC selama masa pemberontakan pun, sebenarnya tidak dapat melakukan tindakan apa-apa, karena diapun telah berada dalam pengaruh VOC melalui Gubernur

---

<sup>100</sup> M Sanggupri Bochari dan Wiwi Kuswiah, *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional, Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 34.

<sup>101</sup> Adeng, Dkk., *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, hlm. 39.

Jendral VOC, laksamana Cornelis Speelman, sehingga tersebar desas-desus bahwa dia adalah “anak” dari laksamana tersebut. Sunan Amangkurat II sendiri bergelar Amral, atau dalam istilah *admiraal* karena kedekatannya dengan laksamana Cornelis Speelman.<sup>102</sup> Meskipun begitu, berkali-kali Sunan Amangkurat II meminta agar VOC tetap pada perjanjiannya di tahun 1677. Memang VOC secara *de jure* tetap mengakui bahwa Cirebon masih menjadi bagian Mataram, hingga benar-benar dilepaskan Mataram oleh Sunan Pakubuwono I pada tahun 1705.

Setelah Cirebon berada dalam protektorat VOC secara *de facto*, indeks perdagangan antara Cirebon dan Batavia menjadi meningkat. Cirebon kemudian berada di bawah kendali VOC. Apapun yang dikehendaki oleh VOC adalah, kebebasan dari berimpor yang sebelumnya pernah dikenakan oleh Keraton sebesar 2% dari nilai barang. Perjanjian itu juga ikut mengartur bahwa pelayaran pribumi harus mendapatkan lisensi dari VOC dan sangat dibatasi. Tidak semua kapal boleh masuk kecuali atas izin dari VOC. Tanaman lada yang diusahakan di wilayah Cirebon diatur oleh VOC dan VOC pula yang menentukan harganya.

Adanya perjanjian tersebut maka secara politis maupun militer Cirebon telah berada di bawah perlindungan langsung dari VOC. Situasi

---

<sup>102</sup>Kata Amral sendiri berasal dari kata dalam bahasa Belanda, *admiraal*, yang berarti laksamana. Sebutan tersebut disematkan pada Sunan Amangkurat II, ketika dia mendapat perlindungan dari laksamana Cornelis Speelman, dalam pemadaman pemberontakan Trunojoyo. Ada desas-desus bahwa sebenarnya dia “anak” dari laksamana Cornelis Speelman sendiri. Laksamana Cornelis Spelman sendiri, adalah komandan utama serdadu VOC dalam Perang Makassar pada tahun 1669 dan perang penaklukan Banten pada tahun 1683. Mona Lohanda, *Kisah Pembesar Pengatur Batavia*, (Depok: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 53.

seperti ini mempertegas kedudukan para penguasa Cirebon, tidak lebih hanya sebagai perantara antara VOC dengan masyarakat pedesaan di pedalaman sebagaimana saat berada di bawah kekuasaan Mataram. Sebagai konsekuensi selanjutnya kerton semakin berorientasi ke dalam (*inwardorientation*) dengan mengembangkan kehidupan kesenian, kerohanian, gaya hidup, dan upacara-upacara keraton yang adiluhung, dengan kemudian beralih pada landasan ekonomi agraris dari sebelumnya ekonomi bahari, yang seluruhnya berpusat di keraton.<sup>103</sup>

Masa-masa sulit akibat pemberontakan yang terjadi di bagian timur Mataram, tidak terjadi di bagian baratnya, yaitu Cirebon. Pada tahun tahun antara 1675-1680, Cirebon menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Jawa. Sejak tahun 1675 dari pelabuhan Cirebon ke Batavia telah diekspor dengan 25 buah kapal sebanyak 38.000 kain tenun, 10 potong ikan asin, 287 pikul gula kelapa, 1.717 *koyang* beras, 155 kendi minyak, 25 sak kapas, 10.000 butir telur asin, 10 karung gula putih, 1.300 ikat padi, 2 pikul tembakau dan 200 lembar kulit kerbau. Hingga tahun 1678 hingga 1681, beberapa barang komoditas penting, berasal dari Cirebon.<sup>104</sup>

Setelah Cirebon berada di bawah protektorat VOC secara *de jure* di tahun 1705, Cirebon menikmati banyak keuntungan, salah satunya adalah ekonomi. Sultan Cirebon didudukkan oleh VOC menjadi Wedana Bupati di samping Sumedang. Sistem Tanam Paksa kopi yang diterapkan oleh VOC

<sup>103</sup> [www.academia.edu/10320357/Monopoli\\_perdagangan\\_VOC\\_di\\_Cirebon](http://www.academia.edu/10320357/Monopoli_perdagangan_VOC_di_Cirebon).

Akses 29 30 November 2016, pukul 20.03.

<sup>104</sup> Bochari dan Kuswiah, *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*, hlm.41-44.

di daerah pedalaman Priangan, mendatangkan keuntungan bagi Sultan Cirebon dan para bupati di Priangan. Makin banyak jumlah pikul kopi yang terkumpul di gudang-gudang VOC, makin banyak pula keuntungan banyak pula pundi-pundi uang di kantong bupati dan Sultan.<sup>105</sup> Lagipula saat Cirebon berada di bawah protektorat Mataram, begitu sedikit keuntungan finansial yang didapat, karena memang Mataram tidak berkenan agar penguasa daerah miskin secara politik dan finansial.<sup>106</sup>

Setiap pikul kopi yang terkumpul dari rakyat, diserahkan kepada VOC dan para Bupati akan mendapat upah sebesar 5-6 gulden. Penguasa setempat juga menikmati berbagai macam pajak, dari pajak tanah hingga pajak jembatan penyeberangan, sehingga dapat dikatakan bahwa para bupati di Priangan dan Sultan Cirebon menjadi penguasa bumiputra yang kaya. Berbeda dengan para koleganya di Pantai Utara Jawa, para bupati di wilayah tersebut tidak menikmati keuntungan apapun, baik dari hasil buminya maupun dari pajak yang ditarik, karena semuanya diserahkan pada VOC tanpa keuntungan apapun sebagaimana yang didapat oleh para bupati Priangan dan Sultan Cirebon.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Peter Boomgaard, *Anak Jajahan Belanda, Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa, 1795-1880*, terj. KITLV, (Jakarta: KITLV, 2004), hlm. 116.

<sup>106</sup> Onghokham, *Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis Nusantara*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 38.

<sup>107</sup> Hardjasaputra, "Bupati di Priangan, Kedudukan dan Peranannya Pada Abad Ke-17-Abad Ke-19", hlm. 35-38.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian di mukastudi ini menyimpulkan bahwa:

1. Memang benar terjadi dinamika yang dinamis relasi Cirebon dan Mataram pada abad 17 sangat kuat nuansa politiknya. Hubungan ini semakin rumit (*complicated*) karena dipengaruhi factor pernikahan.
2. Terjadinya relasi dengan derajat yang setara Cirebon Mataram pasca pengaruh VOC masuk keMataram.
3. Terjadinya hubungan timbal balik selama proses terjadinya relasi berupa hubungan sosio religious.
4. Putusnya relasi karena berbagai peristiwa seperti pemberontakan, naiksasi VOC dan peralihan hubungan religious.

#### B. Saran

Sebagai catatan akhir dari tulisan ini adalah perlunya masukan dan kritik untuk memperbaiki hasil penelitian yang telah diselesaikan penulis.

Menurut penulis, hasil penelitian ini masih jauh dari kata layak, apalagi sempurna. Oleh karena itu kritik-kritik yang konstruktif, akan dijadikan masukan untuk menambal segala kekurangan dalam tulisan ini.

Harapan saya pribadi bagi para peneliti selanjutnya, baik dengan kajian yang sama ataupun dengan kajian yang berbeda, agar selalu bersemangat dalam menggali *khazanah* sejarah Indonesia yang terlalu mahal untuk dilewatkan. Tulisan hasil penelitian ini hanyalah



menyinggung salah satu bagian periode sejarah politik di pulau Jawa pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Masih panjang periode yang dapat diteliti, terkait sejarah relasi politik di pulau Jawa pada umumnya, serta sejarah relasi politik Cirebon secara khusus.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Primer

#### A. Arsip Tercetak

Chijs, M. J. A. Van der, (ed.), *Daghregister Gehoeden in Casteel Batavia, Vant Passerande Daer Als Over Geheel In Nederland-India, Anno 1677*, Batavia dan s'Hage: Landsdukkerij dan M. Nijhoff, 1904.

Haan, F. De, (ed.), *Daghregister Gehoeden in Casteel Batavia, Vant Passerande Daer Als Over Geheel In Nederland-India, Anno 1680*, Batavia dan s'Hage: Landsdukkerij dan M. Nijhoff, 1912.

#### B. Babad

*Babad Trunojoyo-Suropati*, terj. Balai Pustaka, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

*Babad Sultan Agung*, Alih Aksara: Balai Penelitian Bahasa Di Yogyakarta, Alih Bahasa: Soenarko H. Poespito, Yogyakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.

### Sumber Sekunder

#### A. Buku

Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adeng, Dkk., *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998.

Adrisijanti, Inajati, *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*, Yogyakarta: Jendela, 2000.

Ambary, Hasan Muarif, "Pengamatan Beberapa Konsepsi Estetika dan Simbolis Pada Bangunan Sakral dan Sekuler Masa Islam di Indonesia", dalam, Edi

Sedyawati (ed.), *Diskusi Ilmiah Arkeologi II, Estetika Dalam Arkeologi Indonesia*, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1987.

\_\_\_\_\_, *Tinjauan Akeologis dan Historis Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2012.

Bertrand, Alvin L., *Sosiologi, Kerangka Acuan, Metode Penelitian, Teori-teori Tentang Sosialisasi, Kepribadian dan Kebudayaan*, terj. Sanapidh S. Faisal, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.

Bizawie, Zainul Milal, *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia 1945-1949*, Jakarta: Pustaka Kompas, 2014.

Boomgaard, Peter, *Anak Jajahan Belanda, Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa, 1795-1880*, terj. KITLV, Jakarta: KITLV, 2004.

Blusse, Leonard, *Persekutuan Aneh, Pemukim Cina, Wanita Peranakan dan Belanda di Batavia VOC*, terj. -, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Bochari, M Sanggupri, dan Wiwi Kuswiah, *Sejarah Kesultanan Tradisional Cirebon*, Jakarta: Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional, Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, 2001.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Carey, Peter, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa, Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1830*, terj. Tim Komunitas Bambu, Depok, Komunitas Bambu, 2008.

Florida, Nancy K., *Menyurat Yang Silam Menggurat Yang Menjelang, Sejarah Sebagai Nurbuwat di Jawa Pada Masa Kolonial*, terj. Revianto Budi S., dan Nancy K. Florida, Yogyakarta: Bentang, 2002.

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah Pengantar Metode Sejarah*, terj. Nugroho Notosutanto, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.

Graaf, H.J. de, *Disintegrasi Mataram Di Bawah Mangkurat I*, terj. Pustaka Grafitipers dan KITLV, Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1990.

\_\_\_\_\_, dan TH Pigeaud, *Kesultanan Islam Pertama di Jawa, Tinjauan Sejarah Politik Abad XV-XVI*, terj. -, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.

\_\_\_\_\_, *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, terj. Pustaka Utama Grafiti dan KITLV, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.

- \_\_\_\_\_, *Terbunuhnya Kapten Tack, Kemelut Di Kartasura Abad XVII*, terj. Dick Hartoko, Jakarta: Grafiti Press, 1989.
- Haan, Francois de, *Priangan: De Preanger-Regentschappen Onder Het Nederlandsch Bestuur Tot 1811*, Batavia: Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen, 1911.
- Hanafiah, Djohan, *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Hardjasaputra, A. Sobana, "Bupati di Priangan, Kedudukan dan Peranannya Pada Abad Ke-17-Abad Ke-19" dalam, A. Sobana Hardjasaputra (ed.), *Bupati Di Priangan dan Kajian Lainnya Mengenai Budaya Sunda*, Bandung: Yayasan Pusat Studi Sunda, 2004.
- Kano, Hiroyoshi, "Sejarah Ekonomi Masyarakat Pedesaan Jawa: Suatu Penafsiran Kembali", dalam Akira Nagazumi (peny.), *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang, Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Raja, Priyayi dan Kawulo*, Yogyakarta: Ombak, 2009.
- Lohanda, Mona, *Kisah Pembesar Pengatur Batavia*, Depok: Komunitas Bambu, 2010.
- Lombard, Denys, *Nusa Jawa, Silang Budaya Jilid III, Warisan Kesultanan-kesultanan Konsentris*, terj. Winarsih Partaningrat Arifin, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Moedjanto, G., *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Moertono, Soemarsaid, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa pada Masa Lampau, Studi Tentang Mataram II Abad XVI-XIX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.



- Mubtadila, *Intervensi VOC Dalam Suksesi di Istana Mataram, 1677-1757*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2015, tidak diterbitkan.
- Muljana, Slamet, *Runtuhnya Kesultanan Hindu-Jawa dan Munculnya Kesultanan-kesultanan Islam*, Yogyakarta: LkiS, 2006.
- Onghokham, *Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis Nusantara*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Reid, Anthony, *Dari Ekspansi Hingga Krisis Jilid II*, terj. R.Z leirissa dan P. Soemitro, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Rommelink, W.G.J., *Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa, 1725-1743*, terj. Akhmad Santoso, Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Santosa, Reviando Budi, (ed.), *Dari Kabanaran Menuju Yogyakarta, Sejarah Hari Jadi Yogyakarta*, Yogyakarta: Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta, 2008.
- Tjandrasmita, Uka, *Keadaan Ekonomi Politik Kesultanan Cirebon*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Sultan Ageng Tirtayasa*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984.
- Whitten, Tony, Roehayat Emon Soeriaatmadja, Suraya A. Afif, *The Ecology Of Indonesia Series, Volume II; The Ecology of Java and Bali*, Hongkong: Periplus Editions Ltd, 1996.
- Yuanzi, Kong, *Muslim Tionghoa Cheng Ho, Misteri Perjalanan Hibah di Nusantara*, terj. -, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005.
- Yusuf, Mundzirin, (ed.), *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit PUSTAKA, 2006.
- Zuhdi, Susanto, *Cilacap (1830-1942): Bangkit dan Runtuhnya Satu Pelabuhan di Jawa*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000.



## B. Internet

[www.academia.edu/10320357/Monopoli\\_perdagangan\\_VOC\\_di\\_Cirebon](http://www.academia.edu/10320357/Monopoli_perdagangan_VOC_di_Cirebon). Akses 29 30 November 2016, pukul 20.03.

<https://mataram351.wordpress.com/2011/12/21/makam-giriloyo/>. Akses 30 Desember 2016.

## C. Jurnal

Ahmad Adaby Darban, “Perlawanan Kyai Kajoran Melawan Amangkurat I” dalam *Berkala Kajian dan Pengembangan Pesantren, Islam dan Konvergensi Sosial*, edisi: No. 3/VOL.III/1986.

Novida Abbas, Bekas Benteng-benteng Kolonial di Jawa: Penggunaan dan “Penyalahgunaannya”, dalam *Berkala Arkeologi*, Edisi No. 1 tahun XXI/ Mei 2002.

## D. Makalah

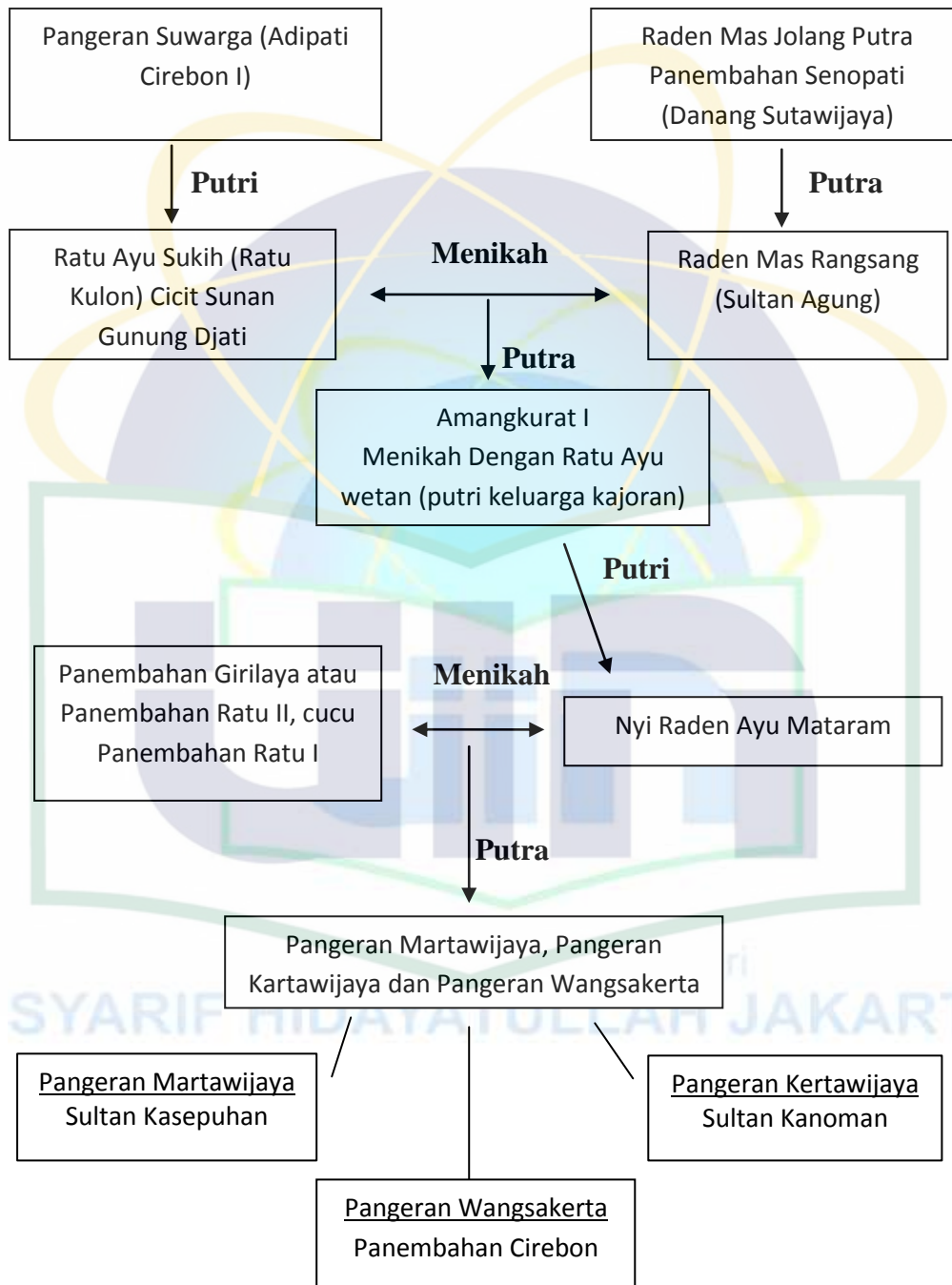
Andi Riana dengan Judul: “Metode Perawatan dan Pengenalan Situs”, disampaikan saat kegiatan *Ekspedisi Sejarah Mataram* yang diselenggarakan oleh Komunitas Mahasiswa Sejarah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2-4 Desember 2011.

## E. Media Audio-Visual

Pernyataan dalam wawancara Sultan Kasepuhan PRA Arief Natadiningrat, dalam acara “Jalan-jalan di Cirebon” di TV One pada tanggal 14.11.2016 jam 14.00-15.00.

Liputan khusus mengenai Kasultanan Cirebon pada acara televisi On The Spot di Trans7 pada tanggal 10 dan 11 November 2016 pukul 19.00-19.30 WIB

**LAMPIRAN**  
**SILSILAH KELUARGA CIREBON DENGAN MATARAM**  
**MENURUT H.J DE GRAAF**



**SILSILAH KELUARGA VERSI  
KESULTANAN KASEPUHAN CIREBON**



Foto diambil setelah diberikan izin atas kebaikan hati *abdi dalem* kraton  
Kasepuhan Cirebon  
Pada kunjungan penulis: 2 Januari 2017.

**SILSILAH KELUARGA VERSI  
KESULTANAN KANOMANAN CIREBON**



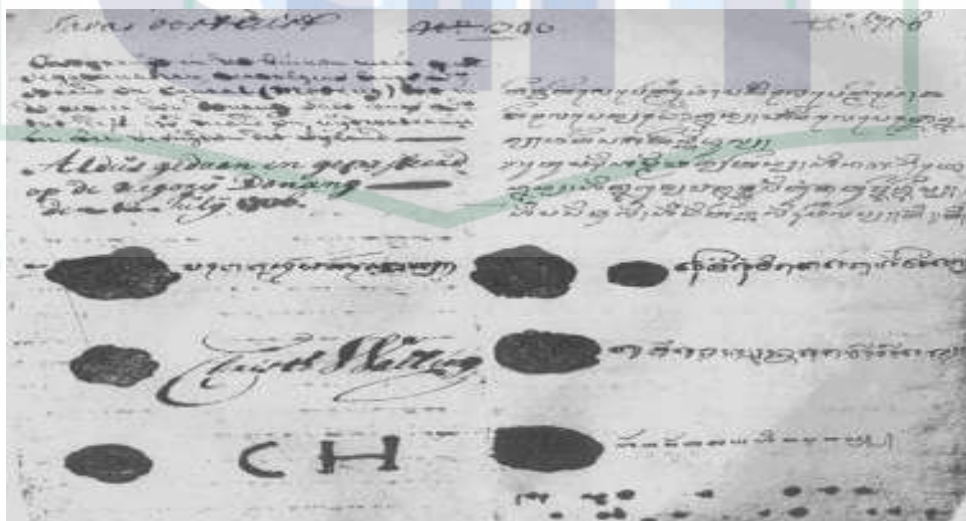
Foto diambil setelah diberikan izin atas kebaikan hati *abdi dalem* kraton  
Kanoman Cirebon  
Pada kunjungan penulis: 2 Januari 2017.

### DRAF PERJANJIAN ANTARA MATARAM DAN VOC DI TAHUN 1677



**NASKAH PERJANJIAN MATARAM-VOC TAHUN 1677**  
(foto diambil dari buku karya Francois de Haan, *Priangan: De Preanger-Regentschappen Onder Het Nederlandsch Bestuur Tot 1811*, (Batavia: Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen, 1911).

### DRAF PERJANJIAN ANTARA MATARAN DAN VOC DI TAHUN 1705



**NASKAH PERJANJIAN MATARAM-VOC TAHUN 1677**  
(foto diambil dari buku karya Francois de Haan, *Priangan: De Preanger-Regentschappen Onder Het Nederlandsch Bestuur Tot 1811*, (Batavia: Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen, 1911).



### KRATON PAKUNGWATI CIREBON SEBELUM TAHUN 1680



Foto diambil setelah diberikan izin atas kebaikan hati *abdi dalem* kraton Kasepuhan Cirebon  
Pada kunjungan penulis: 2 Januari 2017.

### PINTU GERBANG MASJID SANG CIPTARASA



Foto diambil setelah diberikan izin atas kebaikan hati *abdi dalem* kraton Kasepuhan Cirebon.  
Pada kunjungan penulis: 2 Januari 2017.



### PAHATAN KAYU KARYA PANEMBAHAN RATU II



Foto diambil setelah diberikan izin atas kebaikan hati *abdi dalem* museum  
kraton Kasepuhan Cirebon  
Pada kunjungan penulis: 2 Januari 2017.

### KRATON KASEPUHAN CIREBON



Foto diambil setelah diberikan izin atas kebaikan hati *abdi dalem* kraton  
Kasepuhan Cirebon  
Pada kunjungan penulis: 2 Januari 2017.

**MAKAM PANEMBAHAN RATU II DI GIRILAYA, IMOIRI,  
YOGYAKARTA**



Sumber foto: <https://mataram351.wordpress.com/2011/12/21/makam-giriloyo/>.  
Akses 30 Desember 2016.

**BEKAS DINDING MASJID RAYA MATARAM DI PLERED**



**Hasil Ekskavasi Situs Masjid Plered dari BP3 DIY Pada bulan Agustus  
tahun 2009**

(Foto diambil dari makalah Andi Riana dengan Judul: “Metode Perawatan dan Pengenalan Situs”, disampaikan saat kegiatan *Ekspedisi Sejarah Mataram* yang diselenggarakan oleh Komunitas Mahasiswa Sejarah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2-4 Desember 2011., hlm 26.)

### DENAH KRATON MATARAM PLERED



(Peta gambar situasi ini, gambar difoto kembali dari buku: Inajati Adrisijanti, *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*, (Yogyakarta: Jendela, 2000), hlm. 292.)